

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)



DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH

KABUPATEN KEPULAUAN ARU

TAHUN 2016 - 2021

KATA PENGANTAR

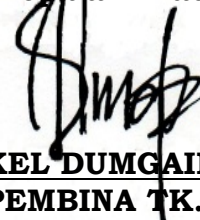
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas perkenaan-NYA penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2016-2021 ini dapat diselesaikan.

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah ini merupakan Dokumen Perencanaan yang diharapkan dapat menjadi acuan bagi penyusunan kegiatan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Aru, selama jangka waktu lima tahun kedepan. Renstra ini disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Tahun 2016-2021.

Dengan terbitnya Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) berkewajiban untuk menyusun Rencana Strategis sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas, sebagai pelaksana sebagian urusan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru Terutama dalam Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2016-2021 dirinci atas dasar Perencanaan tahunan dalam bentuk program sebagai acuan dalam pengajuan anggaran.

Dengan telah tersusunnya Rencana Strategis ini, kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah berperan serta dalam penyusunan Rencana Strategis ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita berikan sebagai usaha bersama akan dapat balasan berupa pahala yang berlipat dari Tuhan Yang Maha Esa dan semoga kita semua diberikan kekuatan lahir batin dalam melaksanakan tugas secara berkesinambungan.

Kepala Dinas



JEHESKEL DUMGAIR, S.Sos
PEMBINA TK.I

NIP. 19640106 198603 1 013

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB 1 PENDAHULUAN	1-1
1.1. Latar Belakang	1-1
1.2. Maksud dan Tujuan	1-2
1.3. Landasan Hukum	1-3
1.4. Sistematika Penulisan Rencana Strategis	1-5
BAB 2 TUGAS POKOK DAN FUNGSI PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	2-1
2.1. Struktur Organisasi	2-1
2.2. Susunan Kepegawaian dan Perlengkapan.....	2-2
2.3. Tugas Pokok dan Fungsi.....	2-4
BAB 3 PROFIL KINERJA PELAYANAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	3-1
3.1 Kinerja Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Kepulauan Aru	3-1
3.2. Analisis Faktor Internal	3-4
3.3. Analisis Faktor Eksternal.....	3-6
3.4. Rumusan Permasalahan Strategis	3-8
BAB 4 ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS	
BAB 5 VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN	4-1
4.1. Visi	4-1
4.2. Misi	4-2
4.3. Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan.....	4-2
BAB 6 PROGRAM	5-1
5.1. Program Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah	5-1
5.2. Pagu Indikatif dan Indikasi Sumber Pendanaan	5-8
BAB 8 PENUTUP	6-1

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Banyaknya Siswa menurut jenis kelamin di Bidang Pendidikan SD, SMP, SLTP baik negeri /swasta tahun 2008, 2009 dan 2010.....	3-1
Tabel 3.2	Banyaknya Angka partisipasi sekolah di Kabupaten Kepulauan Aru.....	3-2
Tabel 3.3	Data Buta Aksara.....	3-3
Tabel 3.4	Banyaknya Rumah Sakit Umum, Puskesmas dan Puskesmas Pembantu dan Tenaga Medis di Kabupaten Kepulauan Aru menurut Kecamatan Tahun 2002-2009.....	3-4
Tabel 3.5	Pola Penyakit, Penderita Rawat Jalan di RS untuk semua golongan umur di Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2009.....	3-5
Tabel 3.6	Kegiatan Balai Kesehatan Ibu dan Anak di Kabupaten Kepulauan Aru, menurut Kecamatan Tahun 2009.....	3-6
Tabel 3.7	Banyaknya bayi lahir hidup, mati dan presentase beerat bayi lahir rendah(BBLR) di Kabupaten Kepulauan Aru menurut Kecamatan 2009.....	3-6
Tabel 3.8	Besarnya Biaya Kesehatan per rumah tangga tahun 2004 dan 2008.....	3-7
Tabel 3.9	Jumlah Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Aru 2008.....	3-7
Tabel 3.10	Data Peserta Keluarga Berencana	3-7
Tabel 3.11	Banyaknya Klinik Keluarga Berencana	3-8
Tabel 3.12	Banyaknya Peserta Aktif Program Keluarga Berencana.....	3-8
Tabel 3.13	Banyaknya Peserta Baru Program Keluarga Berencana.....	3-8

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Aru 2-1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) adalah rencana yang berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1-5 tahun dengan memperhitungkan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang ada atau mungkin timbul. Mengandung visi, misi, nilai-nilai dan faktor penentu keberhasilan dan tujuan pembangunan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan yang diinginkan dan dapat dicapai dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2016-2021, arah kebijakan penyelenggaraan pemerintahan masing-masing instansi dilaksanakan dengan penetapan program pembangunan instansi 5 tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD).

Kedudukan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra- SKPD) adalah sebagai pedoman dan arah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat.

Fungsi Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) adalah sebagai tolok ukur dari pencapaian tujuan pembangunan instansi.

Dalam Undang-undang nomor 52 tahun 2009 tersirat bahwa penduduk sebagai modal dasar pembangunan harus menjadi titik sentral dalam pembangunan berkelanjutan. Jumlah penduduk yang besar dengan pertumbuhan yang cepat dikhawatirkan akan

memperlambat tercapainya kondisi ideal antara kuantitas dan kualitas penduduk dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Program Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional merupakan upaya pokok dalam pengendalian jumlah penduduk dan peningkatan kesejahteraan keluarga sebagai bagian integral pembangunan nasional, perlu terus dilanjutkan dan ditingkatkan pelaksanaannya.

Secara garis besar, pembangunan berwawasan kependudukan adalah pembangunan yang disesuaikan dengan potensi dan kondisi penduduk yang ada, dimana penduduk harus dijadikan titik sentral dalam proses pembangunan, penduduk harus dijadikan subyek dan obyek dalam pembangunan, dimana pembangunan dilaksanakan oleh penduduk dan untuk penduduk. Selain itu, pembangunan berwawasan kependudukan merupakan pembangunan sumberdaya manusia, dimana pembangunan lebih menekankan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dibandingkan dengan pembangunan infrastruktur semata.

Untuk mendukung pelaksanaan pembangunan yang berwawasan kependudukan, maka Dinas Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana turut memperkuat pelaksanaan pembangunan kependudukan dengan upaya pengendalian kuantitas dan peningkatan kualitas penduduk dan mengarahkan persebaran penduduk. Pembangunan kependudukan juga merupakan upaya untuk mewujudkan keserasian kondisi yang berhubungan dengan perubahan keadaan penduduk yang dapat berpengaruh dan dipengaruhi oleh keberhasilan pembangunan berkelanjutan.

1.1 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah(Renstra-SKPD) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah sebagai pedoman dalam menyusun dan mengelola sumberdaya yang dimiliki dalam upaya mencapai tujuan, sasaran, dan program pembangunan yang akan dilaksanakan secara bertahap maupun berkesinambungan demi mewujudkan visi misi Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Aru periode 2016-2021.

Tujuan penyusunan renstra adalah untuk :

- 1) Sebagai pedoman penyusunan Rencana Tahunan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Aru dan Memberikan arah kebijakan perencanaan serta prioritas pembangunan infrastruktur wilayah pada tahun anggaran 2016-2021
- 2) Sebagai pedoman bagi seluruh aparatur Bappeda dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur
- 3) meningkatkan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat yang lebih berdaya guna dan berhasil guna, serta untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi dan tujuan pembangunan

1.2 Landasan Hukum

Landasan penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

adalah sebagai berikut :

1. Landasan Idiil : Pancasila
2. Landasan Konstitusional : Undang-Undang Dasar 1945
3. Landasan Operasional :
 - 1) UU Nomor: 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru;
 - 2) UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - 3) UU Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - 4) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 5) UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah
 - 6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 - 7) Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga
 - 8) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014;

- 9) Peraturan Pemerintah No 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga
- 10) Surat Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan perangkat Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Kep. Aru

1.5 Hubungan Renstra-SKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2016-2021 disusun dengan memperhatikan Amanat Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk Periode 5 (lima) tahun dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Kepulauan Aru. Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Aru sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang merupakan kesinambungan Kebijakan Perencanaan di masa lalu.

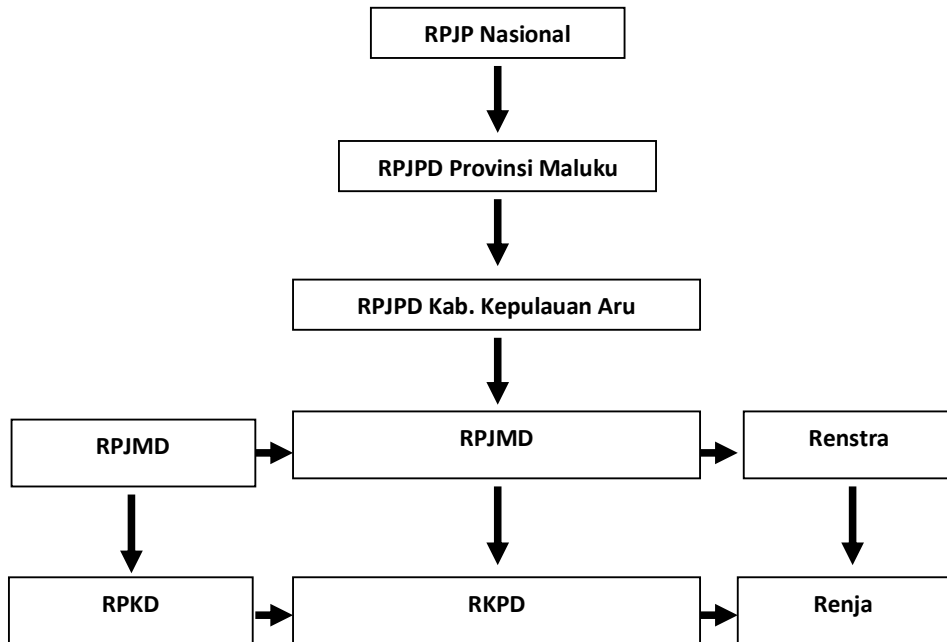
Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Aru mempunyai hubungan dengan beberapa dokumen perencanaan lainnya. Hubungan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

- (1). Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Kepulauan Aru merupakan dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun, dimana periode Renstra ini merupakan segmen awal dari periode RPJP tersebut. RPJP Kabupaten Kepulauan Aru merupakan pedoman dalam penyusunan RPJM Daerah Kabupaten Kepulauan Aru, sementara

RPJM Daerah tersebut menjadi Pedoman dalam penyusunan Renstra Dinas Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana saat ini.

- (2). Rencana Pembangunan jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Kepulauan Aru sebagai dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun, merupakan pedoman dalam penyusunan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Aru. Rancangan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Aru berpedoman pada RPJMD Kabupaten Kepulauan Aru. Selanjutnya Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ini ditetapkan setelah disesuaikan dengan RPJM Daerah Kabupaten Kepulauan Aru.
- (3). Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kepulauan Aru merupakan dokumen Perencanaan Kabupaten Kepulauan Aru untuk periode 1 (satu) tahun dan Penjabaran dari RPJM Daerah Kabupaten Kepulauan Aru. RKPD Kabupaten Kepulauan Aru menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Satuan kerja perangkat Daerah (Renja-SKPD) dan berpedoman pada Renstra SKPD ini. Selanjutnya RKPD Kabupaten Kepulauan Aru menjadi pedoman dalam penyusunan RAPBD Kabupaten Kepulauan Aru.

Keterkaitan Renstra-SKPD Dinas Pekerjaan Umum dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada Gambar 1.1.



Gambar 1.1.
Keterkaitan Dokumen Perencanaan Pembangunan

1.1. SISTEMATIKA PENULISAN RENCANA STRATEGIS

BAB 1 PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Maksud dan Tujuan
- 1.3. Landasan Hukum
- 1.4. Hubungan Renstra-SKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya
- 1.5. Sistematika Penulisan Rencana Strategis

BAB 2 TUGAS POKOK DAN FUNGSI SKPD

- 2.1. Struktur Organisasi
- 2.2. Susunan Kepegawaian dan Aset yang dikelola
 - 2.2.1 Susunan Kepegawaian
 - 2.2.2 Aset yang dikelola SKPD
- 2.3. Tugas Pokok dan Fungsi

BAB 3 PROFIL KINERJA PELAYANAN SKPD

- 3.1. Gambaran Umum Pelayanan SKPD
- 3.2. Analisis Lingkungan Strategis
- 3.3. Isu dan Permasalahan Strategis (dari RPJMD)

BAB 4 ANALISA LINGKUNGAN STRATEGI

- 4.1 Analisis Lingkungan Strategis
- 4.2 Lingkungan Internal
- 4.3 Lingkungan eksternal

BAB 5 VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

- 4.1. Visi dan Misi
- 4.2. Tujuan dan Sasaran
- 4.3. Strategi
- 4.4. Arah Kebijakan

BAB 6 PROGRAM

- 5.1. Program SKPD
- 5.2. Program Lintas SKPD
- 5.3. Program Lintas Kewilayahan
- 5.4. Pagu Indikatif & Indikasi Sumber Pendanaan

BAB 7 INDIKATOR KINERJA UTAMA

- 7.1 Indikator Kinerja Utama

BAB 8 PENUTUP

BAB 2

**PROFIL KINERJA PELAYANAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA**

2.1 Kinerja Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Aru

Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, penduduk harus menjadi titik sentral dalam pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan terencana di segala bidang untuk menciptakan perbandingan ideal antara perkembangan kependudukan dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa harus mengurangi kemampuan dan kebutuhan generasi mendatang, sehingga menunjang kehidupan bangsa.

Hal pokok yang perlu diperhatikan dalam integrasi penduduk dan pembangunan; 1) penduduk tidak hanya diperlakukan sebagai obyek tetapi juga subyek pembangunan. Paradigma penduduk sebagai obyek telah mengeliminir partisipasi penduduk dalam pembangunan, 2) ketika penduduk memiliki peran sebagai subyek pembangunan, maka diperlukan upaya pemberdayaan untuk menyadarkan hak penduduk dan meningkatkan kapasitas penduduk dalam pembangunan. Hal ini menyangkut pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas.

Tujuan Pembangunan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah untuk meningkatkan status dan kondisi penduduk agar dapat mencapai kesetaraan penduduk serta memiliki keluarga berencana yang sejahtera dan berkualitas. Untuk melihat kondisi tersebut di Kabupaten Kepulauan Aru adalah sebagai berikut :

1. Gambaran Umum

Kabupaten Kepulauan Aru merupakan sebuah kabupaten kepulauan yang terdiri dari pulau besar dan kecil. Kabupaten Kepulauan Aru saat ini terdiri dari 547 buah pulau, dimana 89 pulau sudah berpenghuni dan 458 pulau tidak berpenghuni (Data terakhir hasil verifikasi Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Aru). Wilayah Kabupaten Kepulauan Aru menurut astronomi terletak antara 5° - 8° lintang selatan dan 133°5' bujur timur sedangkan menurut letak geografis kabupaten kepulauan aru memiliki batas wilayah sebagai berikut :

Sebelah Selatan : Laut Arafura
Sebelah Utara : Provinsi Papua
Sebelah Timur : Provinsi Papua
Sebelah Barat : Pulau Key Besar

Kabupaten Kepulauan Aru memiliki 10 (sepuluh) kecamatan dan 2 (Dua) Kelurahan. Kecamatan dan Kelurahan merupakan Prioritas dalam menyikapi tantangan Pembangunan pengendalian penduduk dan keluarga sejahtera. Sebagai Dinas yang baru dibentuk ditengah berbagai dinamika yang telah terjadi, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Aru memerlukan percepatan dalam mengorganisir pembangunan baik yang berorientasi ke dalam ataupun menyikapi perkembangan ke luar. Sehingga pada tingkat kebutuhannya, penyusunan renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Aru menjadi hal yang sangat penting untuk dilakukan.

A. Bidang Kependudukan

Jumlah penduduk Kabupaten Kepulauan Aru pada tahun 2015 sebanyak 91.277 jiwa, terdiri dari penduduk laki-laki: 47.310 jiwa dan perempuan : 43.967 Dari data di atas, terlihat bahwa jumlah penduduk perempuan lebih banyak dari jumlah penduduk laki-laki berarti usia produktif sampai lanjut usia penduduk perempuan lebih banyak dari laki-laki, oleh karena itu

penduduk perempuan sangat potensi untuk diberdayakan dan untuk perempuan lanjut usia perlu mendapat perlindungan.

B. Bidang Ekonomi

Produk Domestik Regional Bruto atau PDRB Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2014 tercatat sebesar 2.375.468,56 juta rupiah atas dasar harga berlaku yang berarti mengalami kenaikan sekitar 14,05 persen dari tahun 2013 yang tercatat sebesar 2.082.893,85 juta rupiah.

Hal yang sama juga terjadi pada penghitungan atas dasar harga konstan 2010, dimana pada tahun 2014 tercatat sebesar 1.731.216,09 juta rupiah naik 6,84 persen dari tahun 2013 yang tercatat sebesar 1.620.310,39 juta rupiah.

Pada tahun 2014, bila dilihat dari Distribusi Persentase atas dasar harga berlaku ternyata Kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan masih mendominasi perekonomian Kabupaten Kepulauan Aru dengan kontribusinya sebesar 59,20 persen diikuti Kategori Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib dengan kontribusinya sebesar 12,61 persen, kemudian Kategori Konstruksi sebesar 7,95 persen, Kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 6,91 persen, serta Industri Pengolahan sebesar 2,96 persen. Sedangkan kontribusi terkecil dari Kategori Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 0,02 persen.

C. Bidang Pendidikan

Perkembangan pendidikan di Kabupaten Kepulauan Aru dari tahun ajaran 2011/2012 sampai dengan 2015/2016. Jumlah sekolah, gedung sekolah, ruang belajar, murid, guru dan lulusan dari Sekolah Taman Kanak-Kanak sampai dengan Sekolah Menengah Tingkat Atas perkembangannya dapat digambarkan sebagai berikut :

Jumlah Taman Kanak-Kanak Tahun Ajaran 2015/2016 tercatat 5 buah, gedung sebanyak 5 buah. Sementara Ruang Kelas berjumlah 13 buah dengan jumlah murid laki-laki sebanyak 191 anak dan murid perempuan sebanyak 182 anak serta guru sebanyak 30 orang.

Jumlah SD/ sederajat Tahun Ajaran 2015/2016 tercatat sebanyak 144 sekolah, sedangkan gedung sekolah berjumlah 143 buah dengan ruang kelas sebanyak 853 buah dan jumlah murid laki-laki sebanyak 8.359 orang, sedangkan murid perempuan sebanyak 7.311 orang, guru sebanyak 1.007 orang.

Jumlah SMP/ sederajat Tahun Ajaran 2015/2016 tercatat 40 sekolah, dengan gedung sekolah berjumlah 36 buah sementara ruang kelas sebanyak 222 buah, kelas 231 buah dengan jumlah murid laki-laki sebanyak 2.740 dan murid perempuan sebanyak 2.932 orang. Jumlah guru sebanyak 437 orang.

Jumlah SMA/ sederajat Tahun Ajaran 2015/2016 tercatat 17 sekolah. Sedangkan gedung sekolah berjumlah 12 buah dengan ruang kelas sebanyak 129 buah dan kelas 149 buah. Jumlah murid laki-laki sebanyak 2.228 dan murid perempuan sebanyak 2.191 orang sedangkan jumlah guru 444 orang.

Sejak tahun ajaran 2011/2012, jumlah sekolah terus bertambah. Jumlah sekolah yang ada saat ini diharapkan mampu memfasilitasi seluruh anak usia sekolah agar dapat mengenyam pendidikan sampai pada tataran SMA atau yang sederajat.

Jumlah ruang kelas sebagai sarana belajar mengajar pun mengalami peningkatan, namun demikian terdapat sejumlah ruang kelas yang membutuhkan perhatian karena kondisinya yang belum layak maupun rusak akibat termakan usia.

Secara umum, jumlah murid di Kabupaten Kepulauan Aru menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Trend positif ini hendaknya dibarengi dengan peningkatan kualitas pendidikan di

setiap jenjang pendidikan. Kesenjangan yang sangat besar antara jumlah murid di tingkat sekolah dasar (SD) dengan jumlah murid pada

jenjang pendidikan di atas menunjukkan masih tingginya kecenderungan murid tidak melanjutkan pendidikan setelah tamat SD. Berbeda halnya dengan jumlah murid yang relatif stabil, jumlah guru justru mengalami penurunan dari tahun ajaran 2014/2015 ke tahun ajaran 2015/2016. Pengurangan jumlah guru yang terbanyak pada guru SD/ sederajat dan SMP/ sederajat yaitu sebanyak 70 orang guru. Akan tetapi untuk rasio Murid-Guru di setiap jenjang pendidikan relatif wajar, namun mengalami penyesuaian yang menurun.

Jumlah murid putus sekolah yang tercatat pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Aru pada tahun ajaran 2015/2016 mengalami kenaikan dibandingkan tahun ajaran 2014/2015. Jumlah murid putus sekolah di tahun ajaran 2014/2015 untuk jenjang SMA/ sederajat sebanyak 11 orang murid. Jumlah tersebut mengalami kenaikan hingga 64 orang murid di tahun ajaran 2015/2016. Sedangkan data jenjang SD/ sederajat dan SMP/ sederajat belum tersedia.

D. Bidang Kesehatan

Jumlah Rumah Sakit Umum Dobo dari mulai ada di Kabupaten Kepulauan Aru tidak mengalami perubahan. Disamping itu, Puskesmas yang ada di Kabupaten Kepulauan Aru yang berjumlah 28 buah tersebar di semua kecamatan. Terdapat pula 32 buah Puskesmas Pembantu (Pustu). Banyaknya tenaga kesehatan pada Rumah Sakit Umum, Puskesmas dan Puskesmas Pembantu.

Pada tahun 2015 tidak terdapat Pustu yang ditingkatkan statusnya menjadi Puskesmas. Selain itu, banyak POD yang tidak diaktifkan kembali.

E. Bidang Publik

Informasi tentang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Aru yang memuat tentang nama-nama Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Aru selama dua periode, Hasil Perolehan Suara Sah pada Pemilihan Umum 2014, nama-nama Anggota Dewan yang masih menjabat, serta Banyaknya Keputusan DPRD yang dihasilkan selama periode tahun 2010 hingga sekarang. Hasil Pemilu Legislatif tahun 2014 di tingkat kabupaten menunjukkan bahwa Partai Nasdem mendapatkan jumlah suara sah terbanyak dengan 5.194 suara, disusul oleh Partai Gerindra dengan 4.972 suara dan Partai Keadilan Persatuan Indonesia (PKPI) dengan 4.932 suara.

F. Bidang Keluarga Berencana

Keluarga Berencana adalah program di bidang kependudukan dan kesehatan dalam upaya mencapai masyarakat sehat sejahtera, adil dan makmur dengan Norma Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera [NKKBS] melalui upaya perencanaan.

Berdasarkan data pada Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Kepulauan Aru, alat kontrasepsi yang paling diminati oleh para akseptor KB di Kabupaten Kepulauan Aru adalah suntikan.

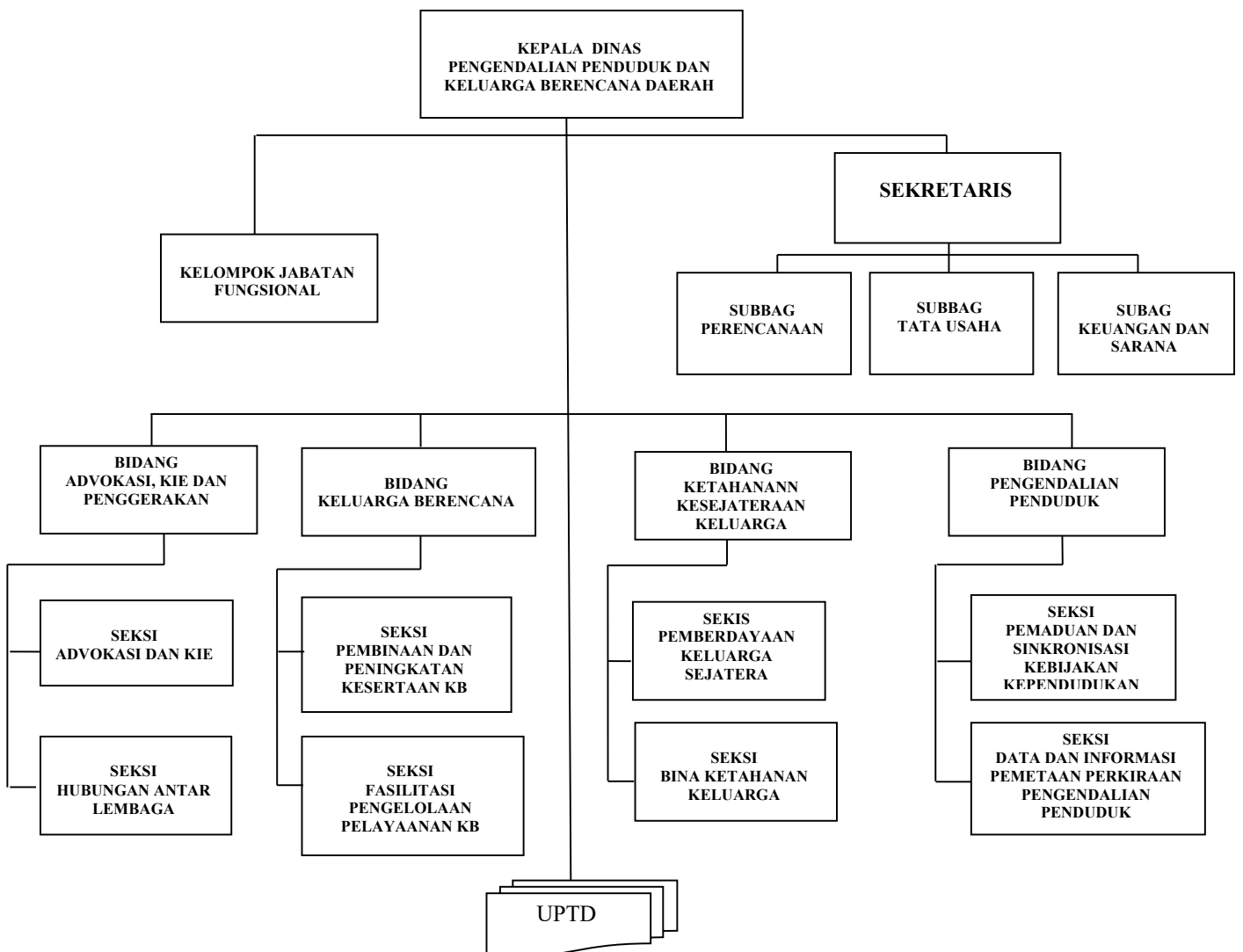
Informasi tentang program Keluarga Berencana (KB) di Kabupaten Kepulauan Aru secara terperinci

BAB 3

TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH

3.1 Struktur Organisasi

Struktur organisasi Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Aru berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Kepulauan Aru, dengan Struktur Organisasi sebagai berikut :



Gambar 3.1 : Struktur Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Kepulauan Aru

Susunan dan perlengkapan kepegawaian di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Kepulauan Aru adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris, membawahi:
 - a. Sub Bagian Perencanaan
 - b. Sub Bagian Tata Usaha
 - c. Sub Bagian Keuangan dan Sarana
3. Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
 - a. Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahterah
 - b. Seksi Bina Ketahanan Keluarga Balita, anak, dan lansia
 - c. Seksi Bina ketahanan Remaja
4. Bidang Pengendalian Penduduk:
 - a. Seksi Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pengendalian Penduduk
 - b. Seksi Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk
 - c. Seksi Data dan Informasi
5. Bidang Keluarga Berencana
 - a. Seksi Pembinaan dan Peningkatan Kesertaan KB
 - b. Seksi Jaminan Pelayanan KB
 - c. Seksi Pengendalian dan Pendistribusian Aldkon
6. Bidang Penyuluhan dan Penggerakan
 - a. Seksi Advokasi dan Penggerakan
 - b. Seksi Penyuluhan dan KIE
 - c. Seksi Pendayagunaan PKB/PLKB dan IMP

a. Susunan Kepegawaian dan Perlengkapan

Jumlah pegawai Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Kepulauan Aru sebanyak 60 orang yang terdiri dari 25 Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 35 Tenaga Kontrak/Honor. Gambaran kompetensi aparat Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Kepulauan Aru dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dapat diuraikan berdasarkan jenis kelamin, tingkat pendidikan formal, pangkat, serta pendidikan dan pelatihan struktural.

Tabel 3.1.
Pegawai Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Berdasarkan Jenis Kelamin

STATUS KEPEGAWAIAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
Pegawai Negeri Sipil	10 orang	16 orang	26
Tenaga Honor	19 orang	32 orang	51
Total			77

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Kepulauan Aru, 2017

Tabel 3.2.
Pegawai Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Berdasarkan Pendidikan Formal

STATUS KEPEGAWAIAN	PENDIDIKAN					Jumlah
	Strata 3	Strata 2	Strata 1	Diploma 3	SLTA	
Pegawai Negeri Sipil		1 orang	13 orang	7 orang	5 orang	26
Tenaga Honor			19 orang	6 orang	26 orang	51
Total						77

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Kepulauan Aru, 2017

Tabel 3.3.
Pegawai Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
Kabupaten Kepulauan Aru
Berdasarkan Pangkat

KEPANGKATAN/GOLONGAN	JUMLAH PNS
Pembina Utama Madya / IVd	-
Pembina Utama Muda / IVc	1 orang
Pembina Tk. I / IVb	1 orang
Pembina / IVa	2 orang
Penata Tk. I / III d	6 orang
Penata Muda/ IIIc	5 orang
Penata Muda Tk. I / III b	5 orang
Penata Muda / III a	1 orang
Pengatur / II d	1 orang
Pengatur Muda Tk. I / II c	4 orang
Pengatur Muda Tk. I / II b	orang
Total	26 Orang

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Aru, 2017

Tabel 3.4.
Pegawai Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Kepulauan Aru
Berdasarkan Diklat Struktural

JENIS DIKLAT	JUMLAH PNS
SPAMEN / PIM II	1 orang
SPAMA / PIM III	6 orang
ADUM / ADUMLA / PIM IV	2 orang

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Aru, 2017

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Aru dalam memberikan pelayanan publik selain didukung oleh personil sebagaimana diuraikan di atas juga didukung sarana operasional (yang merupakan aset) antara lain berupa : gedung, Mobil Unit Pelayanan (mobil), kendaraan roda dua (sepeda motor), serta alat dan perlengkapan kantor dan rumah tangga.

Data mengenai jenis aset, jumlah, kondisi, tahun, nilai perolehan serta lokasi dapat dilihat pada Tabel 2.5.

Tabel 3.5.
Asset Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Aru
Tahun 2017

JENIS ASSET	JUM LAH	TAHUN /JUMLAH /KONDISI									NILAI PEROLEHAN	LOK ASI
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017		
Mobil Pelayanan Keluarga Berencana	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	650,000,000	Dobo
Mobil Penerangan Keluarga Berencana	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	650,000,000	Dobo
Sepeda Motor Pelayanan Keluarga Berencana	18	2/B	-	2/B	6/B	-	2/ B	6/B	-	-	623,883,790	Dobo
Box Motor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Mesin Jensed	1	1/ RB	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000,000	Dobo
Meja	49	5/ RB	11/RB	17/RR	-	-	-	4/B	6/B	6/B	78,750,000	Dobo
Kursi Lipat	124	12/RB	10/RB	57/RR	-	-	-	10/RR	20/B	15/B	73,950,000	Dobo
Computer	12	2/RB	1/RB	3/RB	3/RR	-	-	2/B	1/B	-	130,229,160	Dobo
Laptop	15	1/RB	1/RB	3/RB	2/RB	-	-	6/B	2/B	-	221,000,000	Dobo
Meja Competer	2	-	2/RR	-	-	-	-	-	-	-	2,000,000	Dobo
Printer	17	-	2/RB	2/RB	-	2/RR	2/RB	6/B	-	3/B	35,500,000	Dobo
Obgyn Bed	3	1/B	-	-	-	-	3/B	-	-	-	123,868,433	Dobo
Mesin Ketik	1	1/RB	-	-	-	-	-	-	-	-	1,500,000	Dobo
Ac	11	-	1/RB	2/RR	2/B	-	2/B	2/B	2/B	2/B	67,000,000	Dobo

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Aru, 2017

b. Tugas Pokok dan Fungsi

Dalam mendukung program pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru yang telah dituangkan dalam VISI dan MISI Kabupaten Kepulauan Aru pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, telah ditetapkan fungsinya berdasarkan peraturan BUPATI No 26 Thn 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Aru sebagai berikut :

TUGAS DAN URAIAN TUGAS

**KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN KEPULAUAN ARU**

TUGAS : Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas membantu Bupati dan Walik Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengendalian penduduk, KB, ketahanan dan kesejahteraan.

- FUNGSI : 1. Perumusan kebijakan teknis bidang pengendalian kuantitas penduduk dan KB, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
2. Pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang pengendalian kuantitas penduduk, KB, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
3. Pelaksanaan pepaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian kuantitas penduduk;
4. Pelaksanaan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk;
5. Pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi pengendalian kuantitas penduduk dan KB;
6. Pelaksanaan pendayagunaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB dan kader KB;
7. Pelaksanaan pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi;
8. Pelaksanaan pelayanan KB;
9. Pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pelaksanaan pelayanan, pembinaan kesertaan Ber-KB, pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
10. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan.

- URAIAN TUGAS : 1. Menetapkan kebijakan teknis di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, keluarga sejahtera, penyuluhan dan penggerakan;
2. Melaksanakan pembinaan, pembimbingan di bidang pengendalian penduduk keluarga berencana, keluarga sejahtera, penyuluhan dan penggerakan;
3. Menetapkan program kerja Dinas Pengendalian Penduduk

- dan Keluarga Berencana;
4. Pelaksanaan penggerakana dan pemberdayaan lapangan dalam pelaksanaan program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga;
 5. Pelaksanaan pembinaan dan kerjasama dengan instansi dan organisasi kemasyarakatan;
 6. Menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam pelaksanaan program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga;
 7. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dibidang penduduk, keluarga berencana, keluarga sejahtera, penyuluhan dan penggerakan;
 8. Pelaksanaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana;
 9. Melaksanakan pembinaan, pembimbingan dan penilaian prestasi kerja bawahan;
 10. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan pertimbangan perumusan kebijakan;
 11. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

TUGAS DAN URAIAN TUGAS
SEKRETARIS DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA

KABUPATEN KEPULAUAN ARU

- TUGAS : Melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- FUNGSI : 1. Pelaksanaan koordinasi kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
2. Penyusunan rencana program dan anggaran;
3. Penyelenggaraan urusan ketatausahaan rumah tangga, kepegawaian, hukum, dan organisasi serta hubungan masyarakat;
4. Penyelenggaraan urusan keuangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, dan ganti rugi.

- URAIAN TUGAS :
1. Merumuskan rencana kegiatan secretariat;
 2. Memberikan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, rumah tangga, keuangan dan sarana prasarana;
 3. Melaksanakan koordinasi perencanaan dengan seluruh bidang;
 4. Mengkoordinir penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) setiap kegiatan;
 5. Mengkoordinir penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
 6. Melaksanakan pembinaan kepegawaian di lingkungan organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan KB;
 7. Pelaksanaan pembinaan organisasi dan tata laksana di lingkungan organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan KB;
 8. Menyusun rencana kerja dan anggaran Dinas Pengendalian Penduduk dan KB;
 9. Mengkoordinir penyusunan rencana kerja program dan anggaran Dinas Pengendalian Penduduk dan KB;
 10. Menyusun laporan keuangan yang meliputi neraca laba rugi dan catatan kas laporan keuangan (CALK);
 11. Melaksanakan monitoring evaluasi dan penilaian kinerja bawahan;
 12. Memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai prosedur dan peraturan yang berlaku;
 13. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.

TUGAS DAN URAIAN TUGAS

SUB BAGIAN TATA USAHA

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

KABUPATEN KEPULAUAN ARU

TUGAS : Melakukan pemberian dukungan administrasi ketatausahaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, arsip, dan dokumentasi.

URAIAN TUGAS :

1. Menyusun rencana kegiatan sub bagian tata usaha;
2. Menyusun daftar urut kepegawaian (DUK);
3. Melaksanakan administrasi kepegawaian meliputi mutasi, kepangkatan, penggajian dan pensiunan, cuti dan izin;
4. Memberikan pelayanan administrasi jabatan fungsional;
5. Monitoring dan evaluasi atas kinerja bawahan;
6. Menyiapkan administrasi surat tugas dan perjalanan dinas kepegawaian;
7. Menyusun dan memelihara tata waskat kepegawaian;
8. Melakukan penilaian kinerja bawahan;
9. Menyusun rencana formasi dan besetting pegawai;
10. Mengkoordinasikan penyusunan informasi jabatan/Analisa Jabatan;
11. Menyiapkan bahan usulan pemberian tanda penghargaan dan tanda jasa Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk dan KB;
12. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pembinaan peningkatan kompetensi, dan kesejahteraan pegawai;
13. Melakukan pengarsipan naskah dinas, pengklasifikasi

kajian dan pendistribusian surat masuk dan surat keluar menurut jenisnya;

14. Mempersiapkan pelaksanaan rapat dinas dan upacara bendera;

15. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku.

TUGAS DAN URAIAN TUGAS

SUB BAGIAN PERENCANAAN

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

KABUPATEN KEPULAUAN ARU

TUGAS : Melakukan koordinasi penyusunan rencana program dan anggaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

URAIAN TUGAS : 1. Menyusun rencana kegiatan sub bagian perencanaan;
2. Menyiapkan bahan penyusunan perencanaan yang meliputi Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA);
3. Menyusun dokumen perencanaan program dan Anggaran;
4. Menyiapkan bahan analisa dan evaluasi perencanaan;
5. Mengumpulkan bahan dan laporan kegiatan tahunan;
6. Menyusun laporan hasil pelaksanaan penyusunan program dan anggaran;

7. Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja bawahan;
8. Melaksanakan penilaian kinerja bawahan;
9. Menyusun Standar Operasional dan Prosedur (SOP) dibidang tugasnya;
10. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

TUGAS DAN URAIAN TUGAS

SUB BAGIAN KEUANGAN DAN SARANA

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

KABUPATEN KEPULAUAN ARU

TUGAS : Melakukan administrasi keuangan, pengelolaan barang milik Negara dan sarana program.

URAIAN TUGAS :

1. Menyusun rencana kegiatan sub bagian keuangan dan sarana;
2. Menyiapkan bahan penyusunan dokumentasi rencana kerja anggaran;
3. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, analisa dan penyajian laporan keuangan;
4. Menyusun dokumen sebagai bahan penerbitan Surat Perintah Mambayar (SPM);
5. Memeriksa dan meneliti dokumen Surat Perintah

Membayar (SPM), Uang persediaan (TU) dan pembayaran Langsung (LS) yang diajukan oleh pengguna anggaran (PA);

6. Meneliti kelengkapan dan surat permintaan pembayaran yang diajukan oleh bendahara;
7. Membuat laporan realisasi anggaran;
8. Menyusun laporan keuangan akhir tahun;
9. Melaksanakan administrasi pengelolaan barang milik/kekayaan Negara;
10. Melaksanakan penerimaan, penyimpanan, pemeliharaan dan pengeluaran alat dan obat kontrasepsi;
11. Melaksanakan administrasi/penatausahaan sarana program (Alkon dan non alkon);
12. Monitoring dan evaluasi kinerja bawahan;
13. Melaksanakan penilaian kinerja bawahan;
14. Melaksanakan pembinaan dan pembimbingan kepada bawahan;
15. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

TUGAS DAN URAIAN TUGAS
BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN KEPULAUAN ARU

TUGAS : Melaksanakan kebijakan teknis di bidang pengendalian penduduk Daerah Kabupaten/Kota.

FUNGSI : 1. Perumusan kebijakan Daerah Kabupaten/Kota bidang pengendalian penduduk dan system informasi keluarga;
2. Pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang pengendalian penduduk dan system informasi keluarga;
3. Pelaksanaan kebijakan Daerah Kabupaten/Kota bidang sistem informasi keluarga;
4. Pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan Pemerintahan Daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk;
5. Pelaksanaan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk Daerah Kabupaten/Kota;
6. Pemantauan dan evaluasi kegiatan bidang pengendalian penduduk;
7. Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi bidang pengendalian penduduk;
8. Pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya.

URAIAN TUGAS : 1. Menyusun rencana kerja di bidang pengendalian penduduk;
2. Melaksanakan penyusunan kebijakan pengendalian

penduduk;

3. Melaksanakan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan kabupaten/kota;
4. Menyusun profil kependudukan;
5. Menyusun Grand Design kependudukan;
6. Melaksanakan penyerasian kebijakan kependudukan;
7. Melaksanakan kerjasama pendidikan kependudukan dengan lembaga / organisasi;
8. Melaksanakan analisa dampak kependudukan;
9. Mengkoordinasikan pengintegrasian isu kependudukan dalam perencanaan pembangunan daerah;
10. Mengkoordinasikan pemanfaatan indeks pembangunan berwawasan kependudukan;
11. Mengkoordinasikan data dan informasi dalam rangka pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan wilayah kabupaten/kota;
12. Melaksanakan koordinasi dengan sektor terkait dibidang pengendalian penduduk;
13. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

TUGAS DAN URAIAN TUGAS
SEKSI PEMADUAN DAN SINKRONISASI KEBIJAKAN
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN KEPULAUAN ARU

TUGAS : Melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pemanduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk Daerah Kabupaten/Kota.

URAIAN TUGAS :

1. Menyusun rencana kerja kegiatan sub bidang pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk;
2. Menyiapkan bahan pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) dibidang pemanduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk;
3. Menyiapkan bahan-bahan penyusunan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk;
4. Menyiapkan bahan penyusunan grand design kependudukan;
5. Menyiapkan bahan pengintegrasian isu kependudukan dalam perencanaan pembangunan daerah;
6. Menetapkan sarana pengendalian penduduk di kabupaten/kota;
7. Menyiapkan bahan-bahan pembinaan pengendalian kebijakan kependudukan;
8. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan

- penyerasian pemaduan kebijakan kependudukan;
9. Menyusun laporan hasil pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk;
 10. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

TUGAS DAN URAIAN TUGAS

SEKSI PEMETAAN PERKIRAAN PENGENDALIAN PENDUDUK

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

DI DAERAH KABUPATEN/KOTA

TUGAS : Melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pemetaan perkiraan pengendalian penduduk Daerah Kabupaten/Kota.

URAIAN TUGAS :

1. Menyusun rencana kerja kegiatan seksi pemetaan perkiraan pengendalian penduduk;
2. Menyiapkan bahan pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) dibidang pemetaan perkiraan pengendalian penduduk;
3. Menyusun perencanaan dan analisis dampak kependudukan;
4. Menyiapkan konsep perumusan analisis dampak kependudukan;

5. Menyiapkan konsep perumusan analisis dampak kependudukan;
6. Menyiapkan bahan kajian proyeksi perkiraan pengendalian penduduk cakupan Kab/Kota;
7. Menyiapkan bahan penyusunan profil pengendalian penduduk;
8. Menyiapkan bahan penetapan sasaran pengendalian penduduk;
9. Melaksanakan pemantauan pelaksanaan kegiatan pembinaan perencanaan dan analisis dampak kependudukan;
10. Menyusun laporan hasil pelaksanaan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk;
11. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan berdasarkan peraturan yang berlaku.

TUGAS DAN URAIAN TUGAS

SEKSI DATA DAN INFORMASI

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

KABUPATEN KEPULAUAN ARU

TUGAS : Melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi data dan informasi pengendalian penduduk dan KB.

URAIAN TUGAS : 1. Menyusun rencana kerja kegiatan pada sub bidang data dan informasi;

2. Menyiapkan bahan pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) dibidang data dan informasi;
3. Melakukan pengendalian, pengumpulan data dan informasi pengendalian penduduk, keluarga berencana dan pemberdayaan keluarga;
4. Menyusun perkiraan permintaan masyarakat;
5. Mengumpulkan data mikro keluarga melalui kegiatan pendataan keluarga;
6. Melaksanakan pelaporan bulanan triwulandan tahunan hasil pelaksanaan program;
7. Melakukan pemuyakhiran, pengolahan dan penyediaan data mikro keluarga;
8. Memberikan layanan informasi kepada pihak yang memerlukan tentang pelaksanaan dan hasil program;
9. Malaksanakan kegiatan dokumentasi dan penyelenggaraan data dan informasi program;
10. Menyiapkan bahan-bahan untuk melaksanakan rapat koordinasi;
11. Mengumpulkan dan mengolah data pengendalian penduduk dan keluarga berencana untuk kegiatan laporan umpan balik.
12. Melaksanakan kegiatan pembinaan dan pembimbingan dan fasilitasi pelaksanaan pengumpulan, pengolahan data dan informasi program;
13. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di sub bidang data dan informasi;
14. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

TUGAS DAN URAIAN TUGAS
BIDANG KELUARGA BERENCANA
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN KEPULAUAN ARU

TUGAS : Melaksanakan kebijakan teknis bidang KB daerah Kabupaten/Kota.

FUNGSI : 1. Perumusan kebijakan teknis Daerah kabupaten/Kota bidang KB;
2. Pelaksanaan kebijakan teknis Daerah Kabupaten/Kota bidang KB;
3. Pelaksanaan penyelenggaraan norma, standar prosedur dan kriteria bidang KB;
4. Pelaksanaan penerimaan, penyimpanan, pengendalian dan pendistribusian alat dan obat kontrasepsi Daerah kabupaten/Kota;
5. Pelaksanaan pelayanan KB Daerah Kabupaten/Kota;
6. Pelaksanaan pembinaan kesertaan ber-KB daerah Kabupaten/Kota;
7. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi bidang KB;
8. Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi bidang KB;
9. Pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugas;

URAIAN TUGAS : 1. Menyusun rencana kegiatan di bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi;

2. Menyiapkan bahan-bahan perumusan kebijakan dibidang KB dan Kesehatan reproduksi;
3. Menyusun konsep kebijakan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi;
4. Menyusun bahan-bahan pembinaan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi;
5. Melaksanakan pembinaan dan pembimbingan dibidang keluarga berencana;
6. Melaksanakan pemantauan pelaksanaan pembinaan dan pembimbingan;
7. Memberikan fasilitasi pelaksanaan kebijakan dibidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi;
8. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program di bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan reproduksi;
9. Menyusun laporan pelaksanaan pembinaan pembimbingan kesertaan keluarga berencana;
10. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai peraturan yang berlaku.

TUGAS DAN URAIAN TUGAS
SEKSI PENGENDALIAN DAN PENDISTRIBUSIAN ALAT DAN OBAT
KONTRASEPSI
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN KEPULAUAN ARU

TUGAS : Melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pengendalian dan pendistribusian alat dan obat, kontrasepsi Daerah Kabupaten/Kota.

URAIAN TUGAS : 1. Menyusun rencana kegiatan seksi pengendalian dan pendistribusian alat dan obat;
2. Menyiapkan bahan pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) dibidang pengendalian dan pendistribusian alat dan obat, kontrasepsi;
3. Melaksanakan kegiatan pengamatan terhadap mutu dan kasiat obat yang ada dalam persediaan dan yang akan didistribusikan;
4. Melakukan pembinaan pemeliharaan mutu obat yang ada unit pelayanan kesehatan/Faskes;
5. Mengumpulkan data tentang kerusakan obat dan obat yang tidak memenuhi syarat serta ada efek samping obat dan melaporkan kepada atasan;
6. Menyusun rencana kebutuhan alkon di Faskes/KB keliling;
7. Menyusun dan menghitung rencana kebutuhan alat kontrasepsi;

8. Mengajukan kebutuhan alkon pada secretariat/Sub bagian keuangan dan sarana;
9. Melaksanakan pendistribusian alat dan obat kontrasepsi kepada Fasilitas Layanan Kesehatan/KB keliling;
10. Melaksanakan pencatatan barang-barang yang disimpan;
11. Melakukan pencatatan segala penerimaan dan pengeluaran barang;
12. Melakukan penyiapan surat kiriman barang;
13. Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan agar sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
14. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan untuk disampaikan kepada atasan;

TUGAS DAN URAIAN TUGAS

SEKSI JAMINAN PELAYANAN KELUARGA BERENCANA

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

KABUPATEN KEPULAUAN ARU

TUGAS : Penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi jaminan pelayanan KB Daerah Kabupaten/Kota.

- URAIAN TUGAS :
1. Menyiapkan bahan perumusan dan penyusunan kebijakan teknis dibidang jaminan pelayanan keluarga berencana;
 2. Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis dibidang jaminan pelayanan keluarga berencana;
 3. Menyiapkan bahan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) dibidang jaminan pelayanan keluarga berencana;
 4. Menyiapkan bahan penetapan kebijakan dan pelaksanaan jaminan pelayanan keluarga berencana;
 5. Menyiapkan bahan penetapan dan pengembangan/perluasan jaringan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi;
 6. Menyiapkan bahan penetapan sasaran penggarapan calon akseptor KB;
 7. Menyiapkan model-model pelayanan KB terkini di klinik pemerintah;
 8. Melakukan koordinasi pelaksanaan pelayanan KB dengan mitra kerja;
 9. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan penanggulangan efek samping dan kegagalan pemakaian alat kontrasepsi;
 10. Menyusun dan menghitung rencana kebutuhan alat kontrasepsi;
 11. Menyiapkan serana dan prasarana pelaksanaan KB keliling;
 12. Menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dibidang jaminan keluarga berencana;

13. Menyusun laporan pelaksanaan kebijakan dibidang jaminan keluarga berencana;
14. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
15. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala bidang;

TUGAS DAN URAIAN TUGAS

SEKSI PEMBINAAN DAN PENINGKATAN KESERTAAN BER-KB

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

KABUPATEN KEPULAUAN ARU

TUGAS : Penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pembinaan dan peningkatan kesertaan ber-KB;

URAIAN TUGAS : 1. Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis dibidang pembinaan kesertaan keluarga berencana;

2. Menyiapkan bahan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) dibidang pembinaan dan peningkatan kesertaan keluarga berencana;

3. Menyiapkan bahan penetapan kebijakan dan pelaksanaan pembinaan dan peningkatan kesertaan keluarga berencana;

4. Menyiapkan bahan penggerakan pelayanan MKJP;

5. Menyiapkan bahan sarana dan prasarana pelayanan keluarga berencana mantap dan kontrasepsi jangka panjang yang lebih terjangkau, aman, berkualitas dan merata;
6. Menyiapkan sasaran peningkatan partisipasi pria dalam penggunaan alat/obat kontrasepsi;
7. Menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dibidang pembinaan kesertaan keluarga berencana;
8. Menyusun rencana kerja operasional pelayanan KB;
9. Menyiapkan dan melaksanakan penyuluhan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber KB;
10. Melakukan fasilitasi pelaksanaan program diklinik KB pemerintah dan swasta;
11. Menyiapkan bahan koordinasi peningkatan sasaran penanggulangan masalah kesehatan reproduksi serta peningkatan sasaran kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak;
12. Menyiapkan bahan pelaksanaan promosi pemenuhan hak-hak reproduksi dan promosi kesehatan reproduksi serta pelaksanaan informed choice dan informed consent dalam pelayanan keluarga berencana;
13. Penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan dibidang pembinaan dan peningkatan kesertaan keluarga berencana;
14. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

TUGAS DAN URAIAN TUGAS

BIDANG KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

KABUPATEN KEPULAUAN ARU

- TUGAS** : Melaksanakan kebijakan teknis di bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
- FUNGSI** :
1. Perumusan kebijakan teknis daerah bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
 2. Pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga berencana;
 3. Pelaksanaan kebijakan teknis Daerah Kabupaten/Kota bidang bina keluarga balita;
 4. Pelaksanaan kebijakan teknis Daerah Kabupaten/Kota bidang pembinaan ketahanan remaja;
 5. Pelaksanaan kebijakan teknis Daerah Kabupaten/Kota bidang bina keluarga lansia dan rentan;
 6. Pelaksanaan kebijakan teknis Daerah Kabupaten/Kota bidang pemberdayaan keluarga sejahtera melalui usaha mikro keluarga;
 7. Pemantauan dan evaluasi bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
 8. Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi bidang kesejahteraan dan ketahanan keluarga;
 9. Pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya.
- URAIAN TUGAS** :
1. Menyusun rencana kegiatan di bidang keluarga sejahtera;
 2. Menyiapkan bahan-bahan penyusunan kebijakan di sub bidang bina ketahanan keluarga;

3. Merumuskan kebijakan di sub bidang ketahanan keluarga;
4. Melaksanakan pembinaan kelompok bina ketahanan keluarga;
5. Menyiapkan bahan-bahan pembinaan dan penyuluhan ketahanan keluarga dan ketahanan remaja;
6. Memberikan fasilitasi pada kelompok bina ketahanan keluarga;
7. Mengembangkan kelompok bina ketahanan keluarga;
8. Melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis kepada kelompok PIK – Remaja;
9. Mengembangkan dan memfasilitasi kelompok PIK-Remaja;
10. Melakukan koordinasi dengan sector terkait;
11. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pada sub bidang bina ketahanan keluarga;
12. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

TUGAS DAN URAIAN TUGAS

SEKSI PEMBERDAYAAN KELUARGA SEJAHTERA

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

KABUPATEN KEPULAUAN ARU

TUGAS : Melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pemberdayaan keluarga sejahtera.

- URAIAN TUGAS : 1. Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis dibidang pemberdayaan keluarga sejahtera;
2. Menyiapkan bahan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) dibidang pemberdayaan keluarga sejahtera;
3. Menyusun rencana kerja seksi pemberdayaan keluarga sejahtera;
4. Menyiapkan bahan penetapan syarat-syarat pembentukan kelompok UPPKS;
5. Menyiapkan penetapan pengembangan UPPKS;
6. Memfasilitasi pengembangan kualitas produk UPPKS;
7. Pembinaan dan fasilitasi penggunaan teknologi tepat guna pada kelompok UPPKS;
8. Melaksanakan pembinaan dan pembimbingan pengembangan kualitas produk dan pemasaran hasil UPPKS;
9. Menyiapkan bahan pendampingan kelompok UPPKS;
10. Memfasilitasi kelompok UPPKS untuk mendapatkan bantuan modal;
11. Menyiapkan bahan penetapan kriteria pemberian sertifikat kelayakan usaha (SKU) bagi kelompok UPPKS;
12. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan peningkatan dan pengembangan program ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
13. Memfasilitasi kemitraan kelompok UPPKS dengan usaha ekonomi mikro; dan
14. Melaksanakan tugas lain yang di perintahkan oleh pimpinan.

TUGAS DAN URAIAN TUGAS

SEKSI BINA KETAHANAN KELUARGA, BALITA, ANAK DAN LANSIA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KEPULAUAN ARU

TUGAS : Melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pembinaan ketahanan keluarga, balita, anak dan lansia.

URAIAN TUGAS :

1. Menyiapkan bahan-bahan penyusunan kebijakan di seksi ketahanan keluarga balita, anak dan lansia;
2. Menyiapkan bahan perumusan dan penyusunan kebijakan teknis seksi ketahanan keluarga balita, anak dan lansia;
3. Menyusun rencana kegiatan seksi ketahanan keluarga balita, anak dan lansia;
4. Menyiapkan bahan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) dibidang ketahanan balita, anak dan lansia;
5. Menyiapkan pembentukan kelompok bina keluarga balita (BKB) dan bina keluarga lansia (BKL);
6. Menyiapkan bahan pelaksanaan bina keluarga balita (BKB) dan bina keluarga lansia (BKL);
7. Menyiapkan bahan pembinaan dan fasilitasi kelompok bina keluarga balita (BKB) dan bina keluarga lansia (BKL);

8. Menyiapkan sarana dan prasarana kelompok bina keluarga balita (BKB) dan bina keluarga lansia (BKL);
9. Menyiapkan bahan-bahan pembinaan dan penyuluhan keluarga balita, anak dan lansia;
10. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan seksi ketahanan keluarga balita, anak dan lansia; dan
11. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan;

TUGAS DAN URAIAN TUGAS

SEKSI BINA KETAHANAN REMAJA

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

KABUPATEN KEPULAUAN ARU

TUGAS : Melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pembinaan ketahanan remaja.

URAIAN TUGAS : 1. Menyiapkan bahan-bahan penyusunan kebijakan seksi bina ketahanan remaja;

2. Menyiapkan bahan pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) dibidang ketahanan Remaja;

3. Melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis kepada kelompok PIK – Remaja;
4. Mengembangkan dan memfasilitasi kelompok PIK-Remaja;
5. Menyiapkan bahan pelaksanaan Bina Keluarga Remaja (BKR), dan pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa (PIK-R/M);
6. Menyiapkan bahan pelaksanaan program Generasi berencana (genre);
7. Menyiapkan sarana dan prasarana program generasi berencana (Genre);
8. Menyiapkan bahan-bahan pembinaan dan penyuluhan Bina Ketahanan Remaja;
9. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pada seksi ketahanan remaja;
10. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

TUGAS DAN URAIAN TUGAS
BIDANG PENYULUHAN DAN PENGGERAKAN
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUAPTEN KEPULAUAN ARU

TUGAS : Melaksanakan kebijakan teknis di bidang penyuluhan dan penggerakan.

FUNGSI : 1. Perumusan kebijakan teknis daerah Kabupaten/Kota di bidang penyuluhan, advokasi dan penggerakan bidang pengendalian penduduk dan KB;

2. Pelaksanaan kebijakan teknis Daerah Kabupaten/Kota di bidang penyuluhan, advokasi dan penggerakan bidang pengendalian penduduk dan KB;

3. Pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah Kabupaten/Kota bidang pengendalian penduduk dan KB;

4. Pelaksanaan pendayagunaan tenaga penyuluh KB/Petugas Lapangan KB;

5. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang penyuluhan, advokasi dan penggerakan bidang pengendalian penduduk dan KB;

6. Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang penyuluhan, advokasi dan penggerakan bidang pengendalian penduduk dan KB;

- URAIAN TUGAS : 1. Perumusan kebijakan teknis daerah di bidang penyuluhan, advokasi, komunikasi, Informasi dan edukasi (KIE), dan penggerakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
2. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang penyuluhan, advokasi KIE dan penggerakan pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
3. Pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan di tingkat kabupaten di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
4. Pelaksanaan pendayagunaan tenaga penyuluh KB (PKB)/petugas lapangan KB (PLKB) dan Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP);
5. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang penyuluhan;
6. Advokasi dan penggerakan dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
7. Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang penyuluhan, advokasi dan penggerakan dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
8. Pengembangan media advokasi dan KIE;
9. Melaksanakan KIE melalui sarana media komunikasi MUPEN;
10. Melaksanakan pembinaan dan pembimbingan penyelenggaraan kegiatan advokasi dan KIE;
11. Melaksanakan koordinasi dengan sector terkait dalam pelaksanaan advokasi dan KIE;
12. Menetapkan kriteria pengembangan institusi

masyarakat pedesaan;

13. Menyusun materi pembinaan institusi masyarakat pedesaan;

14. Melaksanakan pembinaan dan pembimbingan institusi masyarakat pedesaan;

15. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dibidang penyuluhan dan penggerakan;

16. Melakukan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

TUGAS DAN URAIAN TUGAS

SEKSI PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI, INFORMASI, EDUKASI DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KEPULAUAN ARU

TUGAS : Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penyuluhan dan komunikasi, informasi, edukasi.

URAIAN TUGAS : 1. Menyusun program dan rencana kerja serta rencana kegiatan di seksi penyuluhan dan komunikasi, informasi, edukasi;
2. Menyusun bahan kebijakan teknis seksi komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) dan penggerakan sesuai

dengan peraturan perundang-undangan dan petunjuk teknis sebagai bahan kajian pimpinan;

3. Menyusun rencana kerja seksi penyuluhan dan KIE sesuai dengan rencana kerja dinas;
4. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penyuluhan dan KIE;
5. Melaksanakan pembinaan, Pembimbingan, norma, standar prosedur dan kriteria pelaksanaan fasilitasi sarana dan prasarana komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) dan penyuluhan dalam pengendalian penduduk dan keluarga Berencana;
6. Melaksanakan program dan kegiatan Seksi penyuluhan dan Komunikasi, Informasi, edukasi (KIE);
7. Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Seksi penyuluhan dan Komunikasi, Informasi, dan edukasi (KIE);
8. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan penyuluhan dan Komunikasi, Informasi, dan edukasi (KIE) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan;
9. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dibidang penyuluhan dan penggerakan;
10. Melakukan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

TUGAS DAN URAIAN TUGAS
SEKSI ADVOKASI DAN PENGGERAKAN
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
DI DAERAH KABUPATEN/KOTA

TUGAS : Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan advokasi.

URAIAN TUGAS : 1. Menyusun rencana kerja kegiatan pada seksi advokasi dan penggerakan;
2. Menyusun konsep rumusan kebijakan dibidang advokasi dan penggerakan;
3. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) seksi advokasi dan penggerakan;
4. Menyiapkan bahan-bahan pelaksanaan advokasi, dan penggerakan;
5. Melaksanakan kegiatan advokasi dan penggerakan;
6. Menetapkan media advokasi dan penggerakan;
7. Melaksanakan advokasi dan penggerakan kepada tokoh formal dan informal;
8. Memfasilitasi penyelenggaraan pembinaan dan pembimbingan kepada tokoh formal dan informal;
9. Penyiapan penggerakan tokoh agama dan masyarakat dalam pelaksanaan program Kependudukan, Keluarga

Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK);

10. Menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dibidang advokasi dan penggerakan;
11. Menyusun laporan pelaksanaan kebijakan dibidang advokasi dan penggerakan;
12. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program di sub bidang advokasi dan penggerakan;
13. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

TUGAS DAN URAIAN TUGAS

SEKSI PENDAYAGUNAAN PKB/PLKB DAN IMP

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

KABUPATEN KEPULAUAN ARU

TUGAS : Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pendayagunaan Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB dan institusi masyarakat pedesaan.

URAIAN TUGAS : 1. Penyusunan rencana kerja dan anggaran dibidang pendayagunaan PKB/PLKB;
2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang Pendayagunaan PLKB;

3. Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) pendayagunaan PKB/PLKB dan IMP;
4. Penyusunan bahan bimbingan teknis dan fasilitas dibidang pendayagunaan PKB/PLKB;
5. Pelaksanaan kegiatan pendayagunaan PKB/PLKB dan IMP;
6. Pelaksanaan koordinasi dalam peningkatan pendayagunaan PKB/PLKB dan IMP bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
7. Pelaksanaan bimbingan teknis dan fasilitasi pendayagunaan PKB/PLKB dan IMP;
8. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pendayagunaan PKB/PLKB dan IMP pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
9. Pembinaan institusi masyarakat pedesaan;
10. Mengembangkan kelembagaan institusi masyarakat pedesaan;
11. Pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis dibidang pendayagunaan PKB/PLKB dan institusi masyarakat;
12. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program Penyuluhan, pendayagunaan PKB/PLKB dan kader KB;
13. Menyusun instrument pengembangan dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Kader Desa;
14. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS

4.1 Analisis Lingkungan Strategis

Setiap organisasi menghadapi masalah lingkungan strategis baik lingkungan internal maupun eksternal. Lingkungan internal mencakup faktor lingkungan yang berpengaruh pada kinerja organisasi yang dapat dikendalikan secara langsung. Sedangkan lingkungan eksternal merupakan faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap kinerja organisasi berada di luar kendali organisasi, tetapi ikut mempengaruhi kinerja organisasi dalam merumuskan langkah-langkah yang strategis. Menyikapi hal demikian analisis lingkungan internal (ALI) dan analisis lingkungan eksternal (ALE) sangat perlu mendapatkan perhatian khusus dari berbagai elemen terkait, terutama bagaimana memetakan aturan/kebijakan agar sinkron dengan kondisi dan tingkat kepentingan. Oleh karena itu dalam menentukan tingkat keberhasilan harus pula disertai dengan tingkat kesiapan fungsi secara sistemik melalui kajian analisis *SWOT (Strength, Weakness, Opportunity dan Threat)*.

1.1 Analisis Lingkungan Internal

Analisis lingkungan internal adalah gambaran potensi-potensi yang dimiliki oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang mempengaruhi terhadap kinerja dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi yang di dalamnya mencakup (1) sumber daya aparatur; (2) sarana dan prasarana; dan (3) organisasi kelembagaan. Rincian kekuatan dan kelemahan lingkungan internal tersebut adalah sebagai berikut:

A. Analisis Faktor Internal

1. Kelemahan

Kelemahan yang perlu diatasi dalam pembangunan pengendalian penduduk dan keluarga berencana Kabupaten Kepulauan Aru, yaitu :

- (1) Masih terbatasnya infrastruktur dasar pengendalian penduduk dan keluarga berencana antara lain prasarana dan sarana perhubungan darat dan laut, sarana prasarana pendidikan dan kesehatan, sumberdaya Manusia yang memenuhi standar.
- (2) Rendahnya tingkat pendidikan warga di Kabupaten Kepulauan Aru.
- (3) Kurang efektif dan masih terbatasnya pelayanan pengendalian penduduk dan keluarga berencana, untuk dapat dijangkau oleh lapisan masyarakat, terutama penduduk di pedesaan.
- (4) Masih rendahnya tingkat kesadaran dan tanggungjawab masyarakat atas kesempatan yang diberikan untuk berpartisipasi dalam mengikuti KB.
- (5) Masih rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai program Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera.
- (6) Masih ada masyarakat khususnya kaum wanita yang masih putus pakai Pengguna Alat Obat Kontrasepsi (DO)
- (7) Masih ada perkawinan di bawah umur bagi remaja
- (8) Kegiatan ekonomi masyarakat masih bersifat ekonomi subsisten dimana produksi pertanian masih berorientasi konsumsi rumah tangga, berskala kecil dan tidak berorientasi pasar, berdampak terhadap rendahnya kesehatan lingkungan.
- (9) Kinerja pelayanan kesehatan tergolong masih rendah. Faktor kematian balita, bayi dan ibu melahirkan sebenarnya dapat dicegah dengan intervensi yang dapat dijangkau dan sederhana.
- (10) Tingginya masyarakat yang mengalami/menderita gizi buruk.
- (11) Kualitas tenaga kesehatan masih perlu ditingkatkan mengingat pesatnya perubahan sosial budaya masyarakat dan majunya teknologi komunikasi.

- (12) Pendidikan dan pelatihan di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dipandang masih kurang, sehingga perlu diupayakan untuk ditingkatkan sesuai dengan jenjang dan profesi yang dimiliki.

2. Kekuatan

Kekuatan yang dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan pembangunan pengendalian penduduk dan keluarga berencana Kabupaten Kepulauan Aru, yaitu :

- (1) Adanya Undang-Undang dan Peraturan yang mendukung Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- (2) Adanya komitmen nasional untuk mendukung program pengendalian penduduk dan keluarga berencana
- (3) Hubungan yang harmonis antara pusat dan daerah.
- (4) Adanya Rencana Strategis Program Keluarga Berencana Nasional yang menyatakan bahwa Pembangunan Keluarga Berencana bertujuan untuk mewujudkan Keluarga yang mempunyai anak ideal, sehat, berpendidikan, sejahtera, berketahanan dan terpenuhi hak-hak reproduksinya dalam kondisi penduduk tumbuh seimbang.

Tabel 4.1

Analisis Faktor Internal Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Kepulauan Aru

Faktor Internal	Kekuatan (S)	Kelemahan (W)
SDM	Telah tersedia sumber daya manusia pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Aru	Sumber daya manusia yang ada masih terbatas dan kurang berkualitas sehingga masih diperlukan Bintek, Diklat serta magang untuk menambah pengetahuan.
Sarana dan prasarana	Adanya bantuan sarana dan prasarana dari pemerintah pusat	Masih terbatasnya infrastruktur dasar pengendalian penduduk dan keluarga berencana antara lain sarana dan prasana perlengkapan kantor, sarana perhubungan darat dan laut.
Organisasi/Kelembagaan	Telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Sumber Daya Manusia yang ada belum memenuhi syarat untuk mengisi jabatan struktural.

B. Analisis Faktor Lingkungan Eksternal

1. Peluang

- (1) Media masa elektronik maupun cetak yang berskala lokal, maupun nasional banyak terdapat di Kabuapten Kepulauan Aru , hal ini perlu dijadikan peluang yang efektif bagi pemerintah untuk mengkomunikasikan kebijakan dan program-program kepada masyarakat secara luas. Untuk itu keberadaan media ini perlu dimanfaatkan dengan baik dan efektif melalui jalinan kerja sama yang saling menguntungkan

- (2) Sarana Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat

Sarana Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat, terdiri dari :
Posyandu (Pos Pelayanan Terpadu): 133 buah, Puskesmas Pembantu: 31 buah, POD (Pos Obat Desa) 8 buah, Poslindes (Pondok Bersalin Desa) 9 buah yang ada di Kabupaten Kepulauan Aru adalah merupakan peluang yang dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk kesehatan keluarga dan lingkungan

- (3) Kemitraan dalam rangka pembangunan pengendalian penduduk dan keluarga di Kabupaten Kepulauan Aru, dilakukan dengan kerja sama atau koordinasi secara lintas sektor terkait. Kemitraan dengan Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, Dinas PU, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial dan dengan pihak swasta lainnya.

2. Tantangan

- (1) Kabupaten Kepulauan Aru merupakan daerah tertinggal dengan potensi sumberdaya yang cukup besar untuk dapat di kelola agar bisa keluar dari keteringgalan. Potensi sumberdaya itu dapat dikelompokkan menjadi Sumberdaya Alam (SDA), Sumberdaya Manusia (SDM), Sumberdaya Sosial (SDS). Ketiga potensi sumberdaya ini semuanya ada di Kepulauan Aru, dan dapat dijadikan modal dasar dalam pengembangan.
- (2) Pemanfaatan potensi SDA yang masih terbatas, kurang terarah, belum terpadu dan relatif tidak berkesinambungan. Hal ini menyebabkan pemanfaatan potensi SDA belum mampu memberikan dukungan terhadap perekonomian daerah secara optimal. Sehingga belum mampu pula meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kepulauan Aru secara maksimal. Demikian pula halnya dengan potensi SDM. Kualitas SDM Kepulauan Aru yang masih rendah lebih banyak menjadi hambatan, tantangan, dan sekaligus ancaman menuju keluarga sejahtera.
- (3) Masih rendahnya aksesibilitas wilayah serta sarana prasarana transportasi darat dan laut dapat menghambat pembangunan sarana dan prasarana pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

- (4) Rendahnya kualitas sarana prasarana permukiman dan perumahan, dengan masih banyaknya penduduk perkotaan dan perdesaan yang belum memiliki tempat tinggal, belum tertatanya sistem perumahan dan lingkungan, baik di kota maupun di desa, dan rendahnya kemampuan masyarakat untuk membangun rumah yang layak huni sesuai dengan standar kesehatan lingkungan. Masyarakat di Kabupaten Kepulauan Aru belum sepenuhnya memahami Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, bisa dilihat dari rendahnya pengetahuan masyarakat tentang Keluarga sejahtera, masih kurangnya ibu rumah tangga yang memakai alat kontrasepsi, sehingga mereka tidak bisa mengatur jarak kehamilan.

Tabel 4.2

Analisis Faktor Eksternal Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Kepulauan Aru

Faktor Eksternal	Peluang (O)	Ancaman (T)
Ekonomi	Meningkatnya pendapatan masyarakat, memungkinkan adanya peningkatan kependudukan melalui kelompok usaha masyarakat	Peningkatan ekonomi masyarakat memberikan peluang bagi masyarakat untuk memilih pelayanan yang lebih baik
Politik	Adanya komitmen pimpinan daerah untuk peningkatan pelayanan agar dapat mengendalikan penduduk dan keluarga berencana	Adanya kepentingan politik dalam penentuan lokasi penyaluran bantuan pelayanan pengendalian penduduk dan keluarga berencana
Sosial	Meningkatnya pengetahuan masyarakat mengakibatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menekan angka kelahiran sehingga dapat mewujudkan keluarga sejahtera	Peningkatan pengetahuan masyarakat tidak ditunjang
Teknologi	Adanya pembiayaan Sistem Informasi Komunikasi Edukasi pengendalian penduduk dan keluarga berencana ditunjang dengan peralatan komputerisasi yang semakin canggih memudahkan untuk mengakses informasi pengendalian penduduk dan keluarga berencana	Peralatan yang ada tidak ditunjang oleh jumlah tenaga dan keahlian yang memadai, sehingga data yang dibutuhkan belum dapat dipenuhi

Lingkungan	Adanya kondisi lingkungan yang kondusif berupa infra struktur memadai yang menunjang kegiatan pelayanan pengendalian penduduk keluarga berencana	Di Kabupaten Kepulauan Aru terdapat beberapa desa yang lokasinya jauh dari balai yang mengakibatkan Kurangnya memberikan pelayanan pengendalian penduduk dan keluarga berencana
------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4.2 Rumusan Permasalahan Strategis

Dari analisis masalah internal dan eksternal yang dihadapi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Aru di atas, maka integrasi strategis yang dapat ditindak lanjuti oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Aru untuk lima tahun mendatang adalah :

- (1) Mengoptimalkan dan meningkatkan kuantitas dan kualitas tenaga penyuluh lapangan keluarga berencana yang dimiliki serta pemanfaatan dan pengoptimalan dukungan masyarakat dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan dan pemerataan serta keterjangkauan pelayanan dan keluarga berencana
- (2) Kualitas Sumber Daya Manusia masih rendah.
- (3) Nilai-nilai sosial budaya di masyarakat mulai terkikis mengakibatkan menurunnya kemampuan masyarakat untuk dapat memahami dengan baik akan adanya keluarga berencana.
- (4) Masih adanya pasangan usia subur (PUS) yang belum memakai alat kontrasepsi sebagai jarak untuk memperjarak angka kelahiran.
- (5) Belum semua Dinas/Instansi/Lembaga mitra membuat data terpisah berdasarkan penduduk/gender.
- (6) Lemahnya koordinasi antar sektor pada semua tingkatan serta mekanisme kerja yang belum memadai merupakan faktor penghambat sekaligus tantangan yang harus dihadapi dalam upaya pengendalian penduduk dan keluarga berencana

BAB 5

VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Visi Misi

Sejalan dengan semangat, tekad dan janji politik, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru terpilih tahun 2016-2021, visi pembangunan Kabupaten Kepulauan Aru 2016-2021 adalah

“Terwujudnya Masyarakat Aru yang Sejahtera, Mandiri, Adil dan Bermartabat melalui Pengembangan Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur Perhubungan dan Ekonomi Kerakyatan”.

Penjelasan visi pembangunan tersebut adalah:

- **Masyarakat Kabupaten Kepulauan Aru yang SEJAHTERA** adalah masyarakat Kepulauan Aru yang mempunyai taraf hidup yang baik dan terus meningkat yang ditandai dengan terpenuhinya hak-hak dasar rakyat terutama kesehatan, pangan dan gizi, air bersih, pendidikan, perumahan, pekerjaan, dan rasa aman;
- **Masyarakat Kabupaten Kepulauan Aru yang MANDIRI** adalah masyarakat Kepulauan Aru yang dapat mengelola sumberdaya yang tersedia secara efisien dan efektif untuk memenuhi kebutuhan dan membangun masa depan yang lebih baik;
- **Masyarakat Kabupaten Kepulauan Aru yang ADIL** adalah masyarakat Kepulauan Aru yang mengutamakan kesetaraan, kemitraan, toleransi, gotongroyong dan tanpa diskriminasi dalam

pengelolaan sumberdaya, pelayanan publik, penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan;

- **Masyarakat Kabupaten Kepulauan Aru yang BERMARTABAT** adalah masyarakat Aru yang mengutamakan penerapan dan pelaksanaan nilai-nilai agama, etika dan moralita, serta nilai-nilai keutamaan sosial budaya bagi terwujudnya kehidupan masyarakat Aru yang rukun, damai, nyaman, penuh toleransi, harmonis, dan bebas dari segala bentuk gangguan, konflik dan tindak kejahatan;
- **Pengembangan PENDIDIKAN** berarti bahwa seluruh penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Kepulauan Aru diarahkan pada terciptanya pelayanan pendidikan yang bermutu, merata dan terjangkau; serta berkembangnya inovasi dan wirausaha;
- **Pengembangan KESEHATAN** berarti bahwa seluruh penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Kepulauan Aru diarahkan pada terciptanya pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau; serta terwujudnya perilaku hidup bersih dan sehat;
- **Pengembangan INFRASTRUKTUR PERHUBUNGAN** berarti bahwa seluruh penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan diarahkan pada terwujudnya prasarana dan sarana perhubungan yang terpadu, modern, dan merata sampai ke desa-desa di pulau-pulau kecil dan terpencil;
- **Pengembangan EKONOMI KERAKYATAN** adalah pengelolaan sumberdaya daerah yang bertumpu pada pengembangan usaha kecil rumah tangga, usaha menengah dan koperasi;

pengembangan kerjasama usaha kecil, menengah dan koperasi dengan usaha besar di bidang pertanian, perikanan, perkebunan, peternakan, perdagangan, pariwisata dan ekonomi kreatif; serta pengembangan industri secara terpadu dan terkait dari hulu sampai ke hilir untuk meningkatkan produktivitas, nilai tambah dan pendapatan masyarakat, mengurangi kemiskinan dan pengangguran, dan pemerataan manfaat pembangunan antar kelompok masyarakat dan antar desa.

Pada hakikatnya membentuk visi adalah menggali gambaran bersama tentang masa depan ideal yang hendak diwujudkan oleh organisasi yang bersangkutan. Visi adalah mental model masa depan, dengan demikian visi harus digali bersama, disusun bersama sekaligus diupayakan perwujudannya secara bersama, sehingga visi menjadi milik bersama yang diyakini oleh seluruh elemen organisasi dan pihak-pihak yang terkait dengan upaya mewujudkan visi tersebut.

Dengan memperhatikan arti dan makna visi tersebut maka ditetapkan visi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2016 - 2021 yaitu :

***“KELUARGA KECIL, SEJAHTERA, HARMONIS DAN
BERKUALITAS”***

Untuk mempersamakan persepsi dan interpretasi dan pemahaman terhadap rumusan visi maka dibuat pengertian operasional sebagai berikut:

Keluarga Kecil: adalah keluarga yang mempunyai anak dua atau disebut dengan Catur Warga.

Sejahtera: adalah mampu memenuhi kebutuhan material dan spritual dan melaksanakan ibadah dengan baik.

Harmonis: adalah semua anggota keluarga hidup rukun dan damai.

Berkualitas: adalah keluarga yang mempunyai ciri-ciri maju, mandiri, memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan kedepan, bertanggung jawab, dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Untuk mencapai visi yang ditetapkan, Dinas PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Kabupaten Kepulauan Aru sudah menetapkan misi. Misi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Aru adalah sebagai berikut:

1. Memberdayakan Masyarakat Membangun Keluarga Kecil dan Berkualitas.
2. Mewujudkan Data Mikro Keluarga yang Akurat.
3. Mewujudkan Peningkatan Kesejahteraan, Kemandirian dan Ketahanan Keluarga.
4. Meningkatkan Advokasi dan KIE serta Kualitas Pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi.
5. Mewujudkan Pembangunan keluarga dalam pengasuhan anak dan perawatan lanjut usia,
6. Mewujudkan Kelembagaan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang berkualitas.

Untuk mempersamakan persepsi dan interpeksi dan pemahaman terhadap rumusan Misi maka dibuat pengertian operasional sebagai berikut:

1. **MEMBERDAYAKAN MASYARAKAT MEMBANGUN KELUARGA KECIL DAN BERKUALITAS**, maksudnya adalah Memotivasi masyarakat agar ikut program Keluarga Berencana agar keluarga tersebut dapat maju, mandiri, memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan kedepan, bertanggung jawab, dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. **MEWUJUDKAN DATA MIKRO KELUARGA YANG AKURAT**, maksudnya adalah Tersedianya data basis yang Up to Date tentang keluarga dan individu anggota keluarga disetiap tingkatan wilayah.
3. **MEWUJUDKAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN, KEMANDIRIAN DAN KETAHANAN KELUARGA**, maksudnya adalah Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam peningkatan pendapatan ekonomi keluarga menuju keluarga sejahtera serta melakukan pembinaan dan menumbuh kembangkan kelompok kelompok kegiatan (Catur Bina).
4. **MENINGKATKAN ADVOKASI DAN KIE SERTA KUALITAS PELAYANAN KB DAN KESEHATAN REPRODUKSI**, maksudnya adalah Penyebarluasan informasi untuk peningkatan kualitas pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi secara baik dan memuaskan, memperkecil angka kegagalan dan komplikasi serta meningkatkan pengetahuan remaja terutama kaum perempuan terhadap reproduksi sehat dan hak reproduksi.

5. **MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN KELUARGA DALAM PENGASUHAN ANAK DAN PERAWATAN LANJUT USIA**, maksudnya adalah setiap keluarga didorong untuk memberikan perhatian pada 1.000 hari pertama kehidupan anaknya, sejak lahir, remaja, hingga memasuki masa lansia, dalam menyiapkan kemampuan dasar anak yang mempengaruhi secara keberlanjutan sampai kemampuan masa lansia ditahap kehidupan selanjutnya.

6. **MEWUJUDKAN KELEMBAGAAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA YANG BERKUALITAS**, maksudnya adalah : Pemberdayaan segala sumber daya aparatur serta sarana prasarana untuk meningkatkan pelayanan yang optimal.

5.2 TUJUAN DAN SASARAN

Sebagaimana Visi dan Misi yang telah ditetapkan maka untuk keberhasilan meraih visi dan misi tersebut perlu ditetapkan tujuan dan sasaran. Tujuan yang ingin diwujudkan oleh Dinas PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA adalah :

1. **Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan** pemerintah daerah provinsi dengan pemerintah daerah kabupaten dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk.
2. **Pemetaan perkiraan pengendalian penduduk** cakupan wilayah kabupaten.
3. Pelaksanaan **advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE)** pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal.
4. **Pendayagunaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB (PKB/PLKB).**
5. Pengendalian dan **pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di kabupaten**
6. **Pemberdayaan dan peningkatan peran serta** organisasi kemasyarakatan tingkat kabupaten dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB.
7. Pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga
8. **Pelaksanaan dan peningkatan peran serta** organisasi kemasyarakatan tingkat kabupaten/kota dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

**Sasaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Kepulauan Aru adalah sebagai berikut:**

1. Pembinaan, pembimbingan, dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan nasional di bidang pengendalian penduduk, penyelenggaraan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga
2. Pembinaan, pembimbingan, dan fasilitasi pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengendalian penduduk, penyelenggaraan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga
3. Penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi di bidang pengendalian penduduk, penyelenggaraan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga;
4. Pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi, dan edukasi, penggerakan hubungan antar lembaga, bina lini lapangan serta pengelolaan data dan informasi di bidang pengendalian penduduk, penyelenggaraan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga;
5. Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengembangan di bidang pengendalian penduduk, penyelenggaraan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga
6. Pelaksanaan tugas administrasi umum
7. Pengelolaan barang milik/ kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya;

5.3 Strategi

- a) Peningkatan pelayanan program keluarga berencana pada masyarakat yang kurang mampu (Miskin).
- b) Mensosialisasikan kesehatan alat reproduksi kepada anak dan remaja.
- c) Peningkatan pelayanan kontrasepsi baik itu pengadaan alat kontrasepsi atau pelayanan pemasangan alat kontrasepsi bagi seluruh lapisan masyarakat.
- d) Peningkatan Pelayanan Komunikasi, Informasi dan edukasi (KIE).
- e) Peningkatan penguatan kelembagaan keluarga kecil berkualitas.
- f) peningkatan monitoring, evaluasi dan pendataan pasangan usia subur.

5.4 Arah Kebijakan

- a) Pembinaan Keluarga Berencana
Arah Kebijakan ini dapat menata kembali program keluarga berencana.
- b) Pelayanan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE).
Arah kebijakan ini dapat menunjang pelayanan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) tentang keluarga berencana, keluarga kecil dan sejahtera.
- c) Peringatan Hari Keluarga Nasional
Arah kebijakan ini dapat mengingatkan dan menyadarkan masyarakat akan keluarga berencana, keluarga kecil dan sejahtera.

d) Monitoring, evaluasi dan pendataan pasangan usia subur

Arah kebijakan ini dapat mengontrol jumlah pasangan usia subur yang mengikuti program keluarga berencana serta tersedianya data mengenai pasangan usia subur yang ada di Kabupaten Kepulauan Aru.

BAB 6

PROGRAM DAN PAGU INDIKATIF

6.1 Program Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Berdasarkan visi dan misi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Aru yang kemudian dijabarkan dalam pelaksanaan program/kegiatan untuk periode 2016-2021 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Aru telah mengagendakan rencana program / kegiatan berdasarkan misi, yaitu sebagai berikut :

1. Misi 1 : Meningkatkan Penyediaan Administrasi Perkantoran, Sarana dan Prasarana Aparatur serta Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja.
 - (1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - (a) Tersedianya Jasa surat menyurat
 - (b) Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik
 - (c) Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan
 - (d) Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor
 - (e) Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
 - (f) Tersedianya Alat tulis kantor
 - (g) Tersedianya Barang cetakan dan penggandaan
 - (h) Penyediaan peralatan rumah tangga
 - (i) Tersedianya makanan dan minuman
 - (j) Tersedianya Rapat-rapat dan koordinasi ke luar daerah
 - (2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - (a) Tersedianya Peralatan gedung Kantor

- (b) Tersedianya Pengadaan Mebeleur
 - (c) Tersedianya Kendaraan Roda 2 (Dua)
 - (d) Tersedianya Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor
 - (e) Tersedianya pemeliharaan ruti/berkala kendaraan dinas operasional.
- (3) Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja.
- (a) Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja (Renja, Renstra, Lakip dan RKA).
- (4) Program Peningkatan Disiplin Aparatu.
- (a) Tersedianya Pakaian batik dan Kostum Olahraga beserta perlengkapannya.
2. Misi 2: Meningkatkan Keahlian/kemampuan sumber daya aparatur melalui diklat, bimtek atau magang untuk mewujudkan pelayanan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- (1) Program Peningkatan Kapasitas sumber daya aparatur
 - (a) Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi PNS (Pelatihan Penyusunan RKA, Renstra dan Pelatihan Pengelolaan Keuangan)
 - (2) Program Peningkatan Kapasitas sumber daya aparatur
 - (a) Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi PNS (Pelatihan Penyusunan RKA, Renstra dan Pelatihan Pengelolaan Keuangan)
3. Misi 3 : Meningkatkan Program Keluarga berencana
- (1) Program Keluarga Berencana
 - (a) Pembinaan kesetaraan ber KB

- (b) Pelatihan Inseri IUD dan Implan
 - (c) Pelayanan Pemasangan Alat Kontrasepsi KB di 117 Desa
 - (d) Pelatihan Pemasangan Implant bagi tenaga pengelola KB
 - (e) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
4. Misi 4: Meningkatkan Program Kesehatan Reproduksi Remaja.
- (1) Program Kesehatan Reproduksi Remaja
 - (a) Sosialisasi program genre melalui media cetak bagi kelompok PIK KKR
 - (b) Seleksi Duta GENRE
 - (c) Pemilihan Duta GENRE
 - (d) Pemberian operasional bagi PIK REMAJA
5. Misi 5 : Meningkatkan Program Pelayanan kontrasepsi
- (1) Program Pelayanan Kontrasepsi
 - (a) Pengadaan alat Kontrasepsi
 - (b) Penyediaan obat-obat efek samping
 - (c) Pelayanan konseling KB
 - (d) Pelayanan kontrasepsi Bagi Masyarakat Rentan
 - (e) KB Kes : PKK dan IBI
 - (f) Monitoring dan Evaluasi
6. Misi 6 : Meningkatnya Program Penyiapan tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga
- (1) Proram Penyiapan tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga
 - (a) Pelatihan Peningkatan Kapasitas Bagi Pengelola kader kelompok bina keluarga

- (b) Sosialisasi kependudukan keluarga berencana pembangunan keluarga di kampung Kb
 - (c) Oprasional Kampung KB
 - (d) Pelatihan bagi kelompok bina keluarga dalam memahami media lansia kit
 - (e) Sosialisasi dan promosi UPPKS
 - (f) Pameran gelar dagang Kelompok UPPKS
 - (g) Monitoring dan Evaluasi
7. Misi 7 : Meningkatkan Program pemutahiran data Kependudukan dan KB
- (1) Program Pemutahiran data kependudukan dan KB
 - (a) Pengolahan data kependudukan
 - (b) Pencatatan dan Pelaporan pelayanan kontrsepsi serta pengendalian lapangan
 - (c) Pencatatan dan pelaporan pasangan usia subur dan aseptor
 - (d) Monitoring Evaluasi dan pelaporan pasangan usia subur dan aseptor
8. Misi 8 : Meningkatkan Program Penyuluhan dan Penggerakan KB
- (1) Program Penyuluhan dan Penggerakan
 - (a) Sosialisasi Pengembangan Komunikasi, Informasi, edukasi
 - (b) Sosialisasi dan advokasi peraturan pemerintah tentang pentingnya penyuluhan dan penggerakan
 - (c) Sosialisasi dan konseling safe Mother Hood
 - (d) Pembinaan bagi petugas penyuluh lapangan keluarga berencana
 - (e) Membangun kemitraan dan penggerakan KB antar daerah
 - (f) Memperingati Harganas (Hari Keluarga Nasional)
 - (g) Monitoring dan evaluasi
9. Misi 9 : Meningkatnya Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri
- (1) Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri
 - (a) Fasilitasi Pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli KB
10. Misi 10 : Meningkatnya Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Melalui Kelompok Kegiatan dimasyarakat.

- (1) Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Melalui Kelompok Kegiatan dimasyarakat.
 - (a) Penyuluhan Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak melalui Kelompok dimasyarakat.

- 11. Misi 11 : Meningkatnya Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR
 - (1) Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR
 - (a) Pendiri Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KKR
 - (b) Fasilitasi Forum Pelayanan KKR Bagi Kelompok Remaja dan Kelompok Sebaya Diluar sekolah.

- 12. Misi 12 : Meningkatnya Program Penyiapan Tenaga Pendamping Bina Keluarga
 - (1) Program Penyiapan Tenaga Pendamping Bina Keluarga
 - (a) Pelatihan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga di Kecamatan.

- 13. Misi 13 : Meningkatnya Program Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-PADU
 - (1) Program Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-PADU
 - (a) Pengkajian Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-PADU.

6.2 Pagu Indikatif dan Indikasi Sumber Pendanaan

Pendanaan pembangunan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tahun 2016-2021 telah tertuang dalam Peraturan Bupati No Tahun 2011 tentang RPJMD Kabupaten Kepulauan Aru 2016-2021, yakni dengan pagu indikatif sebesar Rp. 12.966.000.000,-. Pendanaan tersebut akan digunakan untuk membiayai Program dan Kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana melalui mekanisme DAU.

Rincian kebutuhan pendanaan per program dan per kegiatan dapat dilihat pada Lampiran 1.

BAB 7

INDIKATOR KINERJA UTAMA

7.1 Indikator Kinerja Utama

Untuk mengukur sejauh mana Dinas PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Kabupaten Kepulauan Aru telah mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan, pada masing-masing sasaran strategis ditetapkan indikator kinerja yang harus dicapai pada tahun 2016-2021. Indikator kinerja masing-masing sasaran tersebut merupakan indikator kinerja utama Dinas PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Kabupaten Kepulauan Aru.

Dalam upaya untuk mewujudkan capaian target Indikator Kinerja Utama Dinas PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Kabupaten Kepulauan Aru tahun 2016-2021, akan dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan utama yang akan dilaksanakan untuk mendukung pencapaian IKU serta alokasi anggaran baik yang bersumber dari APBD Kabupaten maupun dari APBN.

secara rinci per program dapat dilihat pada lampiran 1

Lampiran 1

INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2016-2021

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA

BERENCANA KABUPATEN KEPULAUAN ARU

NO	PRO GRAM	KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET (%)					TOTAL ALOKASI ANGGAR AN TH 2016- 2021 (Juta Rupiah)	INSTAN SI PELAK SANA
				2016	2017	2018	2019	2021		
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN									
		1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	• Tersedianya Jasa Surat Menyurat	7	7,5	8	8,5	9	40	DPPKB
		2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	• Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	29	30	31	32	33	155	Sda
		3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	• Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	175	180	185	190	195	925	Sda
		4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	• Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	8	8,5	9	9,5	10	45	Sda
		5. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	• Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	10	10,5	11	11,5	12	55	Sda
		6. Penyediaan Alat Tulis Kantor	• Tersedianya Alat Tulis Kantor	50	55	60	65	70	300	Sda
		7. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	• Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	40	45	50	55	60	250	Sda
		8. Penyediaan Peralatan Rumah tangga	• Tersedianya Peralatan Rumah tangga	11	12	13	14	15	65	
		9. Penyediaan Makanan dan Minuman	• Tersedianya Makanan dan Minuman	145	150	155	160	165	775	Sda
		10. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah	• Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah	550	600	650	700	750	3.250	Sda
2	PROGRAM PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN									
		Penyusunan Renstra ,Renja, Lakip dan RKA	• Jumlah Renstra • Jumlah Renja • Jumlah Lakip • Jumlah RKA	18	19	20	21	22	100	DPPKB
3	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KANTOR									
		1. Pengadaan Peralatan gedung Kantor	• Tersedianya Peratan Gedung Kantor	225	230	235	240	245	1.175	DPPKB
		2. Pemeliharaan Rutin /Berkala Kendaraan Dinas Operasional	• Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional	22	23	24	25	26	120	Sda
		3. Pengadaan Kendaraan Roda 2 (dua)	• Tersedianya Kendaraan Roda 2 (dua)	75	80	85	90	95	425	Sda
4	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR									
		1. Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan	• Terlaksananya Pendidikan dan	120	130	140	150	160	700	Sda

**Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2016 - 2021**

NO	PRO GRAM	KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET (%)					TOTAL ALOKASI ANGGAR AN TH 2016- 2021 (Juta Rupiah)	INSTAN SI PELAK SANA
				2016	2017	2018	2019	2021		
		Fungsi bagi PNS	Pelatihan Teknis dan Fungsi bagi PNS							
		2. Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsi bagi PNS (Pelatihan Pengelola Keuangan)	<ul style="list-style-type: none"> Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsi bagi PNS (Pelatihan Pengelola Keuangan) 	75	80	85	90	95	425	Sda
5	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR									
		Pengadaan pakaian khusus hari –hari tertentu	<ul style="list-style-type: none"> Tersedianya pakaian batik, dan kostum olahraga beserta perlengkapannya. 	8	9	10	11	12	50	DPPKB
7	PROGRAM KELUARGA BERENCANA									
		Pembinaan kesetaraan ber KB	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya pemahaman masyarakat mengenai KB 	113	114	115	116	117	635	DPPKB
		Pelatihn Inersri IUD dan Implan	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya ketrampilan bidan /penyuluh untuk pemasangan IUD dan Implan 	50	55	60	65	70	300	DPPKB
		Pendistribusian alat, obat,dan alkon	<ul style="list-style-type: none"> Tersedianya alat, obat dan alkon di klinik KB 	700	710	720	730	740	3.600	DPPKB
		Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Keluarga Berencana	<ul style="list-style-type: none"> Tercapainya Pertumbuhan penduduk yang mengikuti KB 	40	45	50	55	60	250	DPPKB
8	PROGRAM PELAYANAN KONTRASEPSI									
		1. Pelayanan Pemasangan Alat Kontrasepsi	<ul style="list-style-type: none"> Tercapainya Pertumbuhan penduduk yang seimbang 	75	80	85	90	95	425	DPPKB
		2. Pelatihan Pemasangan Implant bagi tenaga Pengelola KB	<ul style="list-style-type: none"> Terlatihnya Tenaga Pengelola KB dalam pemasangan Implant 	95	100	105	110	115	525	DPPKB
		3. Pelayanan Konseling KB	<ul style="list-style-type: none"> 	155	160	165	170	175	825	DPPKB
		4. Pelayanan Kontrasepsi bagi masyarakat rentan	<ul style="list-style-type: none"> Terpenuhinya TFR tinggi, dan CPR rendah 	120	130	140	150	160	700	
		5. Penyediaan obat-obat efek samping	<ul style="list-style-type: none"> Tersedianya penyediaan obat-obatan kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat 	130	130	130	130	130	650	DPPKB
		6. KB Kes : PKK dan IBI	<ul style="list-style-type: none"> Terlaksananay kerjasama antara PKK dan IBI 	35	38	40	42	45	200	DPPKB
		7. Monitoring dan	<ul style="list-style-type: none"> Terlaksananya 	40	45	50	55	60	250	DPPKB

**Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2016 - 2021**

NO	PRO GRAM	KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET (%)					TOTAL ALOKASI ANGGAR AN TH 2016- 2021 (Juta Rupiah)	INSTAN SI PELAK SANA
				2016	2017	2018	2019	2021		
		evaluasi	Monitoring dan evaluasi							
9	PROGRAM PENYIAPAN TENAGA PENDAMPING KELOMPOK BINA KELUARGA									
		1. Pelatihan Peningkatan Kapasitas bagi pengelola kader kelompok bina keluarga	<ul style="list-style-type: none"> Terlaksananya Pelatihan Peningkatan Kapasitas bagi pengelola kader kelompok bina keluarga 	75	75	75	75	75	375	DPPKB
		2. Sosialisasi kependudukan keluarag berencana pembanguan di kampung KB	<ul style="list-style-type: none"> Terlaksananya Sosialisasi kependudukan keluarag berencana pembanguan di kampung KB 	60	61	62	63	64	310	DPPKB
		3. Oprasional kampung KB	<ul style="list-style-type: none"> Terlaksananya oprasional kampung KB 	130	140	150	160	170	750	DPPKB
		4. Pelatihan bagi kelompok bina keluarga dalam memahami media lansia kit	<ul style="list-style-type: none"> Terlaksananya Pelatihan bagi kelompok bina keluarga dalam memahami media lansia kit 	50	50	50	50	50	250	DPPKB
		5. Mitra kerja KS/PK di kampung KB	<ul style="list-style-type: none"> Terlaksananya Minta kerja KS/PK di kampung KB 			75	75	75	225	DPPKB
		6. Sosialisasi dan Promosi Program UPPKS	<ul style="list-style-type: none"> Terlaksananya Sosialisasi dan Promosi Program UPPKS 			50	55	60	165	DPPKB
		7. Pameran Gela UPPK Sr dagang Kelompok	<ul style="list-style-type: none"> Terlaksananya Pameran Gela UPPK Sr dagang Kelompok 			105	110	115	325	DPPKB
10	PROGRAM PENYULUHAN DAN PENGGERAKAN									
		1. Pembinaan, Penyuluhan dan penggerakan keluarga berencana	<ul style="list-style-type: none"> Terkasananya Pembinaan, Penyuluhan dan penggerakan keluarga berencana 			213	214	215	642	DPPKB
		2. Sosialisasi dan promosi safe mother hood	<ul style="list-style-type: none"> Terlaksananya Sosialisasi dan promosi safe mother hood 			62	63	64	310	DPPKB
		3. Sosialisasi dan Advokasi berbagai peraturan pemerintah tentang penyuluhan dan penggerakan	<ul style="list-style-type: none"> Terlaksananya Sosialisasi dan Advokasi berbagai peraturan pemerintah tentang penyuluhan dan penggerakan 			40	42	45	127	DPPKB
		4. Hari keluarga Nasional	<ul style="list-style-type: none"> Terlaksananya hari keluarga Nasional 			150	160	170	480	DPPKB
11	PROGRAM PEMUTAHIRAN DATA KEPENDUDUKAN DAN KB									
		1. Pengolahan Data kependudukan	<ul style="list-style-type: none"> Terlaksananya Pengolahan Data kependudukan 	40	45	50	55	60	250	DPPKB
		2. Pencatatan dan pelaporan pelayanan kontrsepsi serta pengendalian lapangan	<ul style="list-style-type: none"> Terlaksananya Pencatatan dan pelaporan pelayanan kontrsepsi serta pengendalian 	95	100	105	110	115	525	DPPKB

Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2016 - 2021

NO	PRO GRAM	KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET (%)					TOTAL ALOKASI ANGGAR AN TH 2016- 2021 (Juta Rupiah)	INSTAN SI PELAK SANA
				2016	2017	2018	2019	2021		
			lapangan							
		3. Pencatatan dan Pelaporan pelayanan kontrsepsi serta pengendalian lapangan	<ul style="list-style-type: none"> Terlaksananya Pencatatan dan Pelaporan pelayanan kontrsepsi serta pengendalian lapangan 	45	55	65	75	85	325	DPPKB
		4. Monitoring, Evaluasi dan pendataan PUS	<ul style="list-style-type: none"> Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan pendataan PUS 			32	33	34	160	DPPKB
12	Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri									
		1. Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB	<ul style="list-style-type: none"> Terpenuhinya Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB 			37	38	39	114	DPPKB
13	Program Promosi kesehatan ibu, bayi, dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat									
		1. Penyuluhan kesehatan ibu, baya dan anak melalui kelompok masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> Terlaksananya Penyuluhan kesehatan ibu, baya dan anak melalui kelompok masyarakat 			42	43	44	129	DPPKB
14	Program Pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KKR									
		1. Pendirian Pusat pelayanan Informasi dan Konselibg KKR	<ul style="list-style-type: none"> Terlaksananya Pendirian pusat pelayanan informasi dan konseling KKR 			112	113	114	339	DPPKB
		2. Fasilitasi Forum pelayanan KKR bagi kelompok remaja dan kelompok sebaya diluar sekolah	<ul style="list-style-type: none"> Terlaksananya Fasilitasi Forum pelayanan KKR bagi kelompok remaja dan kelompok sebaya diluar sekolah 			100	110	120	330	DPPKB
15	Program Pegembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak									
		1. Pengumpulan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	<ul style="list-style-type: none"> Terlaksananya Pengumpulan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak 			60	70	80	210	DPPKB
16	Program Penyiapan Tenaga Pendamping kelompok bina keluarga di kecamatan									
		1. Pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga d kecamatan	<ul style="list-style-type: none"> Terlaksananya Pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga d kecamatan 			52	62	72	186	DPPKB
16	Program pengembangan model oprasional BKB- posyandu- PADU									
		1. Pengkajian pengembangan model operasional BKB- Posyandu	<ul style="list-style-type: none"> Terlaksananya Pengkajian pengembangan model operasional BKB- Posyandu 			50	51	52	153	DPPKB

BAB 8

PENUTUP

Dalam upaya penguatan Program Kependudukan , Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang kemudian cukup tergambar pada kondisi pencapaian program secara nasional selama lima tahun terakhir , dimana target/sasaran yang telah ditetapkan belum berhasil dicapai secara maksimal. Sehingga Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana harus lebih meningkatkan komitmen bersama dan lebih membangun kerjasama lintas sektor dengan seluruh mitra kerja utama, untuk bekerja lebih keras dalam upaya pencapaian target/sasaran yang telah ditetapkan di dalam Rencana Strategis Dinas pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2016-2021.

Segala penajaman pada tujuan dan sasaran strategis yang diikuti dengan perumusan indikator-indikator dalam pencapaian sasaran strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tentunya harus bermuara pada visi dan misi pembangunan 2016-2021, Nawa Cita dan Agenda Prioritas Pembangunan Nomor 5 (lima) untuk “ meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia”.

Akhirnya segala upaya dalam implementasi Program pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang telah direncanakan di dalam dokumen Renstra ini diharapkan mendapat dukungan sepenuhnya dari seluruh unit kerja di lingkungan Pemerintahan Kabuapten Kepulauan Aru. sehingga setiap program dan kegiatan disetiap unit kegiatan dapat dipertanggungjawabkan dalam pelaksanaannya.

Kepala Dinas



JEHESKEL DUMGAIR, S.Sos
NIP. 19640106 198603 1 013

Lampiran 1
TARGET PEMBANGUNAN TAHUN 2016-2021
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KEPULAUAN ARU

NO	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET (%)					TOTAL ALOKASI ANGGARAN TH 2016-2021 (Juta Rupiah)	INSTANSI PELAKSANA
				2016	2017	2018	2019	2021		
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN									
		1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	<ul style="list-style-type: none"> Tersedianya Jasa Surat Menyurat 	7	7,5	8	8,5	9	40	DPPKB
		2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	<ul style="list-style-type: none"> Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 	29	30	31	32	33	155	Sda
		3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	<ul style="list-style-type: none"> Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan 	175	180	185	190	195	925	Sda
		4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	<ul style="list-style-type: none"> Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor 	8	8,5	9	9,5	10	45	Sda
		5. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	<ul style="list-style-type: none"> Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 	10	10,5	11	11,5	12	55	Sda
		6. Penyediaan Alat Tulis Kantor	<ul style="list-style-type: none"> Tersedianya Alat Tulis Kantor 	50	55	60	65	70	300	Sda
		7. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	<ul style="list-style-type: none"> Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan 	40	45	50	55	60	250	Sda
		8. Penyediaan Peralatan Rumah tangga	<ul style="list-style-type: none"> Tersedianya Peralatan Rumah tangga 	11	12	13	14	15	65	Sda
		9. Penyediaan Makanan dan Minuman	<ul style="list-style-type: none"> Tersedianya Makanan dan Minuman 	145	150	155	160	165	775	Sda
		10. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah	<ul style="list-style-type: none"> Tersedianya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah 	550	600	650	700	750	3.250	Sda
2	PROGRAM PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN									
		Penyusunan Renstra ,Renja, Lajip dan RKA	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah Renstra Jumlah Renja Jumlah Lajip Jumlah RKA 	18	19	20	21	22	100	DPPKB
3	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KANTOR									
		1. Pengadaan Peralatan gedung Kantor	<ul style="list-style-type: none"> Tersedianya Peratan Gedung Kantor 	225	230	235	240	245	1.175	DPPKB
		2. Pemeliharaan Rutin /Berkala Kendaraan Dinas Operasional	<ul style="list-style-type: none"> Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional 	22	23	24	25	26	120	Sda
		3. Pengadaan Kendaraan Roda 2 (dua)	<ul style="list-style-type: none"> Tersedianya Kendaraan Roda 2 (dua) 	75	80	85	90	95	425	Sda
4	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR									
		1. Pendidikan dan Pelatihan Teknis	<ul style="list-style-type: none"> Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan 	120	130	140	150	160	700	Sda

NO	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET (%)						TOTAL ALOKASI ANGGARAN TH 2016-2021 (Juta Rupiah)	INSTANSI PELAKSANA		
				2016	2017	2018	2019	2021					
		dan Fungsi bagi PNS	Teknis dan Fungsi bagi PNS										
		2. Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsi bagi PNS (Pelatihan Pengelola Keuangan)	<ul style="list-style-type: none"> Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsi bagi PNS (Pelatihan Pengelola Keuangan) 	75	80	85	90	95		425		Sda	
5	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Pengadaan pakaian khusus hari – hari tertentu	<ul style="list-style-type: none"> Tersedianya pakaian batik, dan kostum olahraga beserta perlengkapannya. 	8	9	10	11	12		50		DPPKB	
7	PROGRAM KELUARGA BERENCANA	Pembinaan kesetaraan ber KB	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya pemahaman masyarakat mengenai KB 	113	114	115	116	117		635		DPPKB	
		Pelatihan Inseksi IUD dan Implan	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya ketrampilan bidan /penyuluh untuk pemasangan IUD dan Implan 	50	55	60	65	70		300		DPPKB	
		Pendistribusian alat, obat,dan alkon	<ul style="list-style-type: none"> Tersedianya alat, obat dan alkon di Klinik KB 	700	710	720	730	740		3.600		DPPKB	
		Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Keluaraga Berencana	<ul style="list-style-type: none"> Tercapainya Pertumbuhan penduduk yang mengikuti KB 	40	45	50	55	60		250		DPPKB	
8	PROGRAM PELAYANAN KONTRASEPSI	1. Pelayanan Pemasangan Alat Kontrasepsi	<ul style="list-style-type: none"> Tercapainya Pertumbuhan penduduk yang seimbang 	75	80	85	90	95		425		DPPKB	
		2. Pelatihan Pemasangan Implant bagi tenaga Pengelola KB	<ul style="list-style-type: none"> Terlatihnya Tenaga Pengelola KB dalam pemasangan Implant 	95	100	105	110	115		525		DPPKB	
		3. Pelayanan Konseling KB	<ul style="list-style-type: none"> Terpenuhinya TFR tinggi, dan CPR rendah 									DPPKB	
		4. Pelayanan Kontrasepsi bagi masyarakat rentan	<ul style="list-style-type: none"> Tersedianya penyediaan obat-obatan kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat 	120	130	140	150	160		700		DPPKB	
		5. Penyediaan obat-obat efek samping	<ul style="list-style-type: none"> Terlaksananya kerjasama antara PKK dan IBI 	130	130	130	130	130		650		DPPKB	
		6. KB Kes : PKK dan IBI	<ul style="list-style-type: none"> Terlaksananya kerjasama antara PKK dan IBI 	35	38	40	42	45		200		DPPKB	
		7. Monitoring dan evaluasi	<ul style="list-style-type: none"> Terlaksananya Monitoring dan evaluasi 	40	45	50	55	60		250		DPPKB	
9	PROGRAM PENYIAPAN TENAGA PENDAMPING KELOMPOK BINA KELUARGA	1. Pelatihan Peningkatan Kapasitas bagi pengelola kader kelompok bina keluarga	<ul style="list-style-type: none"> Terlaksananya Pelatihan Peningkatan Kapasitas bagi pengelola kader kelompok bina keluarga 	75	75	75	75	75		375		DPPKB	

NO	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET (%)					TOTAL ALOKASI ANGGARAN TH 2016-2021 (Juta Rupiah)	INSTANSI PELAKSANA			
				2016	2017	2018	2019	2021					
		2. Sosialisasi kependudukan keluarga berencana pembangunan di kampung KB	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya Sosialisasi kependudukan keluarga berencana pembangunan di kampung KB 	60	61	62	63	64	310	DPPKB			
				3. Operasional kampung KB	130	140	150	160			170	750	DPPKB
				4. Pelatihan bagi kelompok bina keluarga dalam memahami media lansia kit	50	50	50	50			50	250	DPPKB
				5. Mitra kerja KS/PPK di kampung KB			75	75			75	225	DPPKB
				6. Sosialisasi dan Promosi Program UPPKS			50	55			60	165	DPPKB
				7. Pameran Gela UPPKSr dagang Kelompok			105	110			115	325	DPPKB
10	PROGRAM PENYULUHAN DAN PENGGERAKAN												
		1. Pembinaan, Penyuluhan dan penggerakan keluarga berencana	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya Pembinaan, Penyuluhan dan penggerakan keluarga berencana 			213	214	215	642	DPPKB			
		2. Sosialisasi dan promosi safe mother hood	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya Sosialisasi dan promosi safe mother hood 			62	63	64	310	DPPKB			
		3. Sosialisasi dan Advokasi berbagai peraturan pemerintah tentang penyuluhan dan penggerakan	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya Sosialisasi dan Advokasi berbagai peraturan pemerintah tentang penyuluhan dan penggerakan 			40	42	45	127	DPPKB			
		4. Hari keluarga Nasional	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya hari keluarga Nasional 			150	160	170	480	DPPKB			
11	PROGRAM PEMUTAHIRAN DATA KEPENDUDUKAN DAN KB												
		1. Pengolahan Data kependudukan	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya Pengolahan Data kependudukan 	40	45	50	55	60	250	DPPKB			
		2. Pencatatan dan pelaporan pelayanan kontrasepsi serta pengendalian lapangan	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya Pencatatan dan pelaporan pelayanan kontrasepsi serta pengendalian lapangan 	95	100	105	110	115	525	DPPKB			
		3. Pencatatan dan Pelaporan pelayanan kontrasepsi serta pengendalian lapangan	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya Pencatatan dan Pelaporan pelayanan kontrasepsi serta pengendalian lapangan 	45	55	65	75	85	325	DPPKB			
		4. Monitoring, Evaluasi dan pendataan PUS	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan pendataan PUS 			32	33	34	160	DPPKB			
12	Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri												
		1. Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB	<ul style="list-style-type: none"> • Terpenuhinya Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB 			37	38	39	114	DPPKB			
13	Program Promosi kesehatan ibu, bayi, dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat												
		1. Penyuluhan kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya Penyuluhan kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok masyarakat 			42	43	44	129	DPPKB			
14	Program Pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KKR												

NO	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET (%)					TOTAL ALOKASI ANGGARAN TH 2016-2021 (Juta Rupiah)	INSTANSI PELAKSANA
				2016	2017	2018	2019	2021		
		1. Pendidikan Pusat pelayanan Informasi dan Konsellbg KKR	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya Pendidikan pusat pelayanan Informasi dan Konselling KKR 			112	113	114	339	DPPKB
		2. Fasilitasi Forum pelayanan KKR bagi kelompok remaja dan kelompok sebaya diluar sekolah	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya Fasilitasi Forum pelayanan KKR bagi kelompok remaja dan kelompok sebaya diluar sekolah 			100	110	120	330	DPPKB
15	Program Pegermbangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	1. Pengumpulan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya Pengumpulan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak 			60	70	80	210	DPPKB
16	Program Penyiapan Tenaga Pendamping kelompok bina keluarga di kecamatan	1. Pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga d kecamatan	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya Pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga d kecamatan 			52	62	72	186	DPPKB
16	Program pengembangan model operasional BKB- posyandu- PADU	1. Pengkajian pengembangan model operasional BKB- Posyandu	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya Pengkajian pengembangan model operasional BKB- Posyandu 			50	51	52	153	DPPKB